



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**  
**PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN**

JALAN PELABUHAN NO. 1 PENGAMBENGAN KEC. NEGARA,  
KAB. JEMBRANA - BALI KODE POS 82251  
TELEPON (0365) 42968 Ext :1

Laman <https://kkp.go.id/djpt/ppnpengambengan> E-mail [ppn.pengambengan@kkp.go.id](mailto:ppn.pengambengan@kkp.go.id)

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KUASA PENGGUNA ANGGARAN**  
**PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN**  
Nomor : B.5270/PPN.PGB/RC.220/XI/2023

**TENTANG**

**PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2020 - 2024**  
**PADA PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN**  
**TAHUN 2022**

**Kuasa Pengguna Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menyusun perencanaan pembangunan perikanan tangkap jangka menengah tahun 2020-2024, perlu menetapkan rencana strategis Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan Tahun 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelabuhan tentang Rencana Strategis Tahun 2020-2024;
- Menimbang** : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1322);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN KEPALA PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2020 – 2024 PADA PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN**

**KESATU :** Menetapkan Rencana Strategis Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra PPNP Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

**KEDUA :** Renstra PPNP Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

**KETIGA :** Renstra PPNP Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis PPNP setiap tahunnya pada periode Tahun 2020-2024

**KEEMPAT :** Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PPNP Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud diktum KETIGA, dilakukan oleh Kepala Pelabuhan.

**KELIMA :** Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan

**KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pengambengan  
Pada tanggal : 30 November 2023

Kepala,  
  
Andi Manojengi, S.St.Pi, M.Si  
50417 200212 1 002

### **Tembusan :**

1. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
2. Direktur Pelabuhan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
3. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara - Singaraja

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap  
Kementerian Kelautan dan Perikanan



# RENCANA STRATEGIS

Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan  
**Tahun 2020 - 2024**

**REVISI KE 4**



Pelabuhan Perikanan Nusantara  
**Pengembangan**



**2020**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga selesailah penyusunan Rencana Startegis Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan Tahun 2020-2024.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengantelah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan tahun 2020-2024. Renstra Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program dan kegiatan pengelolaan perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan yang akan dilaksanakan langsung pelabuhan perikanan dengan mendorong peran aktif masyarakat perikanan di kawasan pelabuhan perikanan selama kurun waktu tahun 2020–2024.

Rencana Strategis ( Renstra) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengantahun 2020-2024 sebagai pedoman perencanaan bagi Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengandalam menyusun rencana kerja program dan kegiatan tahunan dalam pembangunan perikanan tangkap selama lima tahun yang berisikan strategi, kebijakan, program dan kegiatan beserta penganggaran untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dokumen rencana strategis ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk pelaksanaan pembangunan perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan baik untuk lingkup pelabuhan perikanan maupun stakeholder di kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan serta pihak-pihak lain yang terkait.

Jembrana,30 November 2023

Kepala Pelabuhan

Perikanan Nusantara Pengambengan



Andi Manojengi, S.St.Pi, M.Si

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
BAB 1. PENDAHULUAN.....	5
1.1 Latar Belakang .....	5
1.2 Kondisi Umum.....	6
1.3 Lingkup Strategis.....	8
1.4 Kedudukan .....	11
1.5 Tugas dan Fungsi.....	13
1.6 Maksud dan Tujuan .....	15
1.7 Alur Pikir .....	15
BAB 2. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS .....	17
2.1 Pembangunan Kelautan dan Perikanan.....	17
2.2 Pembangunan Perikanan Tangkap .....	18
2.2.1 Visi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap .....	18
2.2.2 Misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.....	18
2.2.3 Tujuan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.....	18
2.2.4 Sasaran Program Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.....	19
2.2.5 Visi dan Tujuan PPN Pengambengan .....	21
2.2.6 Sasaran Strategis.....	22
BAB 3. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	26
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan .....	26
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perikanan tangkap.....	31
3.2.1 Pendekatan Konseptual .....	31
3.2.2 Arah Kebijakan dan Strategi.....	35
BAB 4. INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .....	58
4.1 Target Kinerja.....	58
4.2 Kerangka Pendanaan .....	59
BAB 5. PENUTUP .....	58

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Indikator Kinerja PPN Pengembangan .....	58
Tabel 4.2 Rencana Pendanaan Kegiatan dan Anggaran di PPN Pengembangan Tahun 2020 – 2024 .	61

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik perkembangan jumlah kapal perikanan.....	7
Gambar 1.2 Volume Produksi 2015-2019.....	8
Gambar 1.3 Nilai Produksi Tahun 2015-2019.....	8
Gambar 1.4 Alur pikir penyusunan Renstra.....	16
Gambar 3.1 Implementasi Pendekatan Supply-Demand terhadap Manajemen Perikanan Tangkap ..	34
Gambar 3.2 Pendekatan perencanaan strategis subsector perikanan tangkap, arah kebijakan utama, serta kegiatan prioritas tahun 2020 – 2024.....	35
Gambar 3.3 Pemetaan Dukungan Stakeholder Potensial terhadap Pembangunan Perikanan Tangkap ..	46
Gambar 3.4 Sebaran 538 Pelabuhan Perikanan per WPPNRI ..	49
Gambar 3.5 Sebaran Kapal Perikanan Perizinan Pusat per WPPNRI (per Juli 2020) ..	50
Gambar 3.6 Sebaran Kapal Perikanan Perizinan Daerah, berdasarkan SIPI pada aplikasi SIMKADA per WPPNRI (per Juli 2020).....	50
Gambar 3.7 Proyeksi Pertumbuhan Volume Produksi per Provinsi 2020-2024 ..	50
Gambar 3.8 Proyeksi Pertumbuhan Nilai Produksi per Provinsi 2020-2024 ..	51
Gambar 3.9 Proyeksi Pertumbuhan Jumlah Nelayan per Provinsi 2020-2024 ..	51
Gambar 3.10 Proyeksi Pertumbuhan NTN per Provinsi 2020-2024 ..	52
Gambar 3.11 Proyeksi Pertumbuhan Volume Produksi per WPPNRI 2020-2024.....	52
Gambar 3.12 Proyeksi Tingkat Produksi Komoditas Tuna, Cakalang, Tongkol per WPPNRI 2020-2024 ..	53
Gambar 3.13 Proyeksi Tingkat Produksi Komoditas Utama per WPPNRI 2020-2024 ..	53
Gambar 3.14 Struktur organisasi DJPT ..	57

# **BAB 1.**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran visi Indonesia 2045 untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian. Pencapaian visi tersebut dilakukan melalui transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi dan reformasi birokrasi. Pidato Presiden pada saat pelantikan tanggal 20 Oktober 2019 menyampaikan fokus-fokus pembangunan dalam lima tahun ke depan meliputi pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi. Kelima fokus program utama arahan presiden tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan melalui tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024.

Tujuh agenda pembangunan tersebut adalah (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Pembangunan perikanan tangkap 2020-2024 memiliki keterkaitan erat secara langsung dengan agenda penguatan ekonomi serta pengembangan wilayah. Kegiatan pembangunan sub sektor perikanan tangkap oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan. Potensi pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap Indonesia masih sangat besar, yaitu potensi lestari sebesar 12,54 juta ton per tahun, dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) sebesar 10,03 juta ton per tahun atau sekitar 80 persen dari potensi lestari, serta pemanfaatan usaha yang baru mencapai sebesar 7,53 juta ton sampai tahun 2019.

Berbagai upaya akselerasi pembangunan perikanan tangkap selanjutnya diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat, peningkatan penyerapan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan, serta konsumsi ikan masyarakat, yang pada akhirnya akan memperkuat struktur ekonomi yang kokoh dan maju serta turut serta dalam mewujudkan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan.

## **1.2 Kondisi Umum**

Capaian pembangunan Ditjen Perikanan Tangkap tahun 2015-2019 didasarkan pada realisasi pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama pembangunan perikanan tangkap. Pembangunan perikanan tangkap memiliki 3 sasaran strategis utama yakni 1) terwujudnya kesejahteraan masyarakat nelayan; 2) terwujudnya pengelolaan perikanan tangkap yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan, serta; 3) terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Pencapaian sasaran strategis selanjutnya direpresentasikan melalui pencapaian indikator kinerja utama serta dukungan pelaksanaan kegiatan prioritas. Perkembangan kondisi umum pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan tahun 2015 - 2019 sebagai berikut :

### **1. Nilai Tukar Nelayan (NTN)**

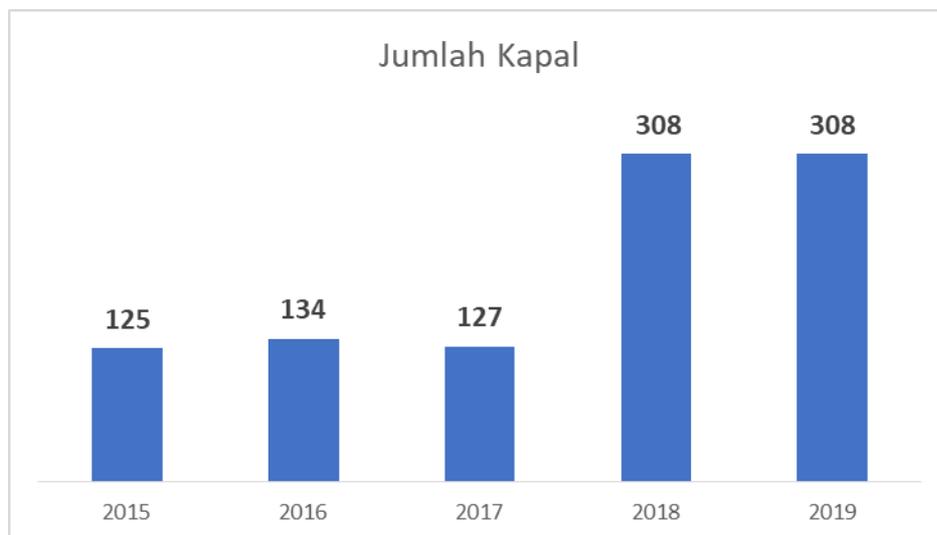
Realisasi NTN tahun 2015-2019 selalu mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 1,74 per tahun. Nilai tukar nelayan di tahun 2015 tercatat sebesar 106,14 meningkat cukup tinggi di tahun 2019 dimana tercatat sebesar 113,74. Meningkatnya capaian NTN tersebut sangat dipengaruhi oleh indeks harga yang diterima nelayan (IT) dengan indeks harga yang dibayar nelayan (IB), dimana indeks harga yang diterima nelayan mengalami peningkatan sedangkan indeks harga yang dibayar nelayan mengalami penurunan. Selama tahun 2019, NTN mengalami peningkatan yang disebabkan oleh kenaikan pendapatan nelayan. Indeks harga yang diterima nelayan (IT) mengalami kenaikan sebesar 3,14 persen. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata harga ikan mengalami peningkatan akibat perbaikan kualitas ikan yang diperjualbelikan. Sedangkan indeks harga yang dibayar nelayan (IB) juga mengalami peningkatan sebesar 2,72 persen dimana peningkatan terbesar adalah indeks konsumsi rumah tangga sebesar 3,22 persen. Hal ini menunjukkan

bahwa biaya yang dikeluarkan oleh nelayan lebih kecil dibandingkan biaya yang diterima oleh nelayan.

## 2. Jumlah armada kapal perikanan

Jumlah armada kapal perikanan yang beraktifitas di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan selama kurun waktu tahun 2015 - 2019 mengalami peningkatan dan penurunan secara fluktuatif dengan rata-rata penigkatan sebesar 29,94%. Jumlah armada kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan jika sesuai dengan ukuran kapal dapat ikategorikan sebagai berikut: 1) 195 unit kapal dengan dibawah 5 GT atau sebesar 63,3% ; 2) 36 unit kapal dengan ukuran 5-10 GT sebesar 11,7% ; 3) 25 unit kapak dengan ukuran 11-20 GT atau sebesar 8,1% ; dan 4) 52 unit kapal dengan ukuran 21-30 GT sebesar 16,9%. Adapun grafik perkembangan jumlah armada kapal di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Gambar 1.1 Grafik perkembangan jumlah kapal perikanan

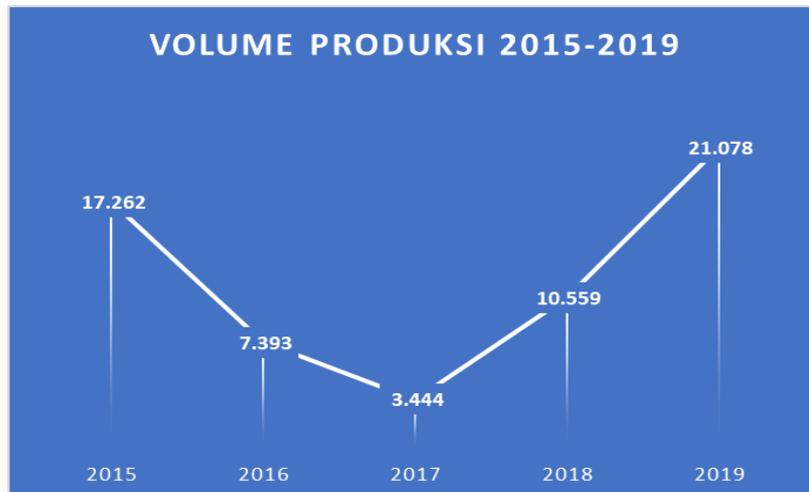


## 3. Volume Produksi Perikanan Tangkap

Rata-rata volume produksi hasil tangkapan nelayan di pelabuhan perikanan Nusantara Pengambengan pada tahun 2015-2019 juga mengalami penurunan cukup signifikan pada tahun 2016 yakni penurunan produksi mencapai 57,2 % dan pada tahun 2017 juga mengalami penurunan kembali sebesar 53,4%. Namun mulai tahun 2018 produksi hasil tangkapan nelayan mulai meningkat signifikan sebesar 206,6% dan tahun 2019 juga mengalami

peningkatan mencapai 50,1%. Sehingga pada 5 tahun terakhir ini produksi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan mengalami peningkatan rata-rata 29,22% pertahun.

Gambar 1.2 Volume Produksi 2015-2019 nilai



#### 4. Nilai Produksi Perikanan Tangkap

Seiring dengan peningkatan realisasi volume produksi perikanan tangkap, realisasi rata-rata nilai produksi perikanan tangkap tahun 2015-2019 juga meningkat sebesar 43,75% per tahun. Nilai produksi perikanan tangkap tercatat sebesar Rp 75,87 milyar di tahun 2015 meningkat menjadi Rp.99,99 milyar pada tahun 2019. Nilai produksi perikanan tangkap jenis Lemuru, Layang, Cumi, Layur dan Tongkol menyumbang sebagian besar dari capaian nilai produksi secara keseluruhan.

Gambar 1.3 Nilai Produksi Tahun 2015-2019



### 1.3 Lingkup Strategis

Pembangunan perikanan tangkap sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan strategis yang dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu lingkungan internal dan eksternal. Dengan demikian potensi dan

permasalahan yang telah teridentifikasi pada bagian sebelumnya akan dielaborasi pada konteks lingkungan strategis internal maupun eksternal, untuk selanjutnya sekaligus dianalisis berbagai alternatif dasar arah kebijakannya.

Secara khusus, proses identifikasi akan ditelaah sampai pada lingkup kegiatan. Metode SWOT akan digunakan sebagai dasar analisis agar proses telaah dapat dielaborasikan ke dalam lingkungan strategis, sekaligus untuk mempermudah perumusan alternatif arah kebijakan.

Sebagai jembatan yang menghubungkan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan yang telah ditetapkan dengan strategi, kebijakan dan program pembangunan yang akan ditempuh maka perlu diawali dengan analisis lingkungan strategis yang senantiasa berkembang dinamis. Analisis dimaksud mencakup analisis lingkungan internal dan eksternal, dimana masing-masing analisis ditinjau dari tiga aspek utama, yakni sosial, ekonomi dan ekologi. Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal dan eksternal, maka dapat diketahui unsur-unsur kekuatan (strength), kelemahan (weakness) peluang (opportunities) dan ancaman (threats). Keempat unsur tersebut harus dapat dianalisa untuk menentukan strategi yang tepat dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

#### A. Faktor Internal

##### a) Kekuatan

Dengan memperhatikan stakeholders dalam rangka mempertahankan eksistensi dan kemampuan bersaing, Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan memiliki kekuatan yang dijabarkan sebagai berikut :

- Produksi hasil tangkapan yang optimal mencapai 21078 Ton dengan nilai produksi Rp 106.043.880.360,- pada tahun 2019 di Selat Bali
- Potensi PNBPN yang telah melampaui target pada tahun 2019 sejumlah Rp 259.986.000,-
- SDM pelabuhan perikanan mencapai 87 orang
- Lahan PPN Pengambangan yang bersertifikat dan dapat dikelola sebesar 13.5 ha
- Dukungan Pemerintah pusat maupun daerah
- Lokasi PPN Pengambangan yang strategis

- Keamanan dari gelombang air laut
- Pengembangan pelabuhan yang lebih modern

#### b) Kelemahan

- Keterbatasan kedalaman kolam labuh akibat sedimentasi ekstrim perairan
- Sistem lelang yang masih belum optimal
- Belum adanya kantor pelayanan terpadu satu pintu di PPN Pengambangan
- Zonasi wilayah operasional pelabuhan yang masih belum optimal
- Belum tersedianya fasilitas operasional pendukung pelabuhan seperti lampu navigasi, perbaikan kapal dll
- Perizinan kapal penangkap ikan purse seine dua kapal yang masih terkendala dengan regulasi Permen KP 71
- Keamanan dan ketertiban di PPN Pengambangan
  - Teknologi penangkapan ikan yang masih kurang
  - Pengelolaan mutu ikan yang masih rendah

### B. Faktor Eksternal

#### a) Peluang

- Luas lahan yang tersisa yang masih berpotensi untuk dimanfaatkan oleh investor di PPN Pengambangan
- Fasilitas pokok, fungsional, dan penunjang yang memadai
- Tersedianya *cold storage*/ UPI di PPN Pengambangan
- Tersedianya kantor instansi lain di PPN Pengambangan
- Potensi SDI Selat Bali yang masih tinggi
- Lokasi PPN Pengambangan dekat dengan fishing ground
- Jumlah pengusaha penunjang perikanan dapat ditingkatkan
- Peningkatan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan nelayan
- Peningkatan mutu dan kualitas hasil tangkapan ikan
- Peningkatan nilai jual hasil perikanan

#### b) Tantangan

- Harga ikan yang masih rendah
- Sistem lelang yang berpotensi menimbulkan kerugian terhadap nelayan

- Hasil tangkapan yang menurun disaat tidak musim ikan
- IUU Fishing di perairan selat bali
- Perkembangan teknologi perikanan sulit diikuti oleh nelayan
- Masih ada pelaku usaha yang tidak melaporkan hasil tangkapannya
- Terhambatnya akses bongkar muat kapal ikan di PPN Pengambangan
- Mutu dan kualitas hasil perikanan di PPN Pengambangan

#### **1.4 Kedudukan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 20/PERMEN- KP/2020 tanggal 16 Mei 2020, pelabuhan perikanan adalah unit pelaksana teknis di bidang pelabuhan perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dasar hukum pengelolaan pelabuhan perikanan antara lain :

1. Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 tentang perubahan UndangUndang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
2. Undang-Undang RI No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
3. Undang-Undang RI No.18 Tahun 2008 tentang Sampah.
4. Undang-Undang RI No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
5. Undang-Undang RI No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
6. Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut.
7. Peraturan Pemerintah RI No.75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
8. Peraturan Pemerintah RI No.49 Tahun 2011 tentang Usaha Perikanan.
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 52/PERMEN-KP/2014 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan.
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan.
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.PER.12/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas.
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.PER.13/MEN/2012 tentang Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan.
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.PER.27/MEN/2012 tentang Pedoman Umum Industrialisasi Kelautan dan Perikanan.

14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.3/PERMEN-KP/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan.
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.20/PERMEN-KP/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan.
17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.48/PERMEN-KP/2014 tentang Logbook Penangkapan Ikan.
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.56/PERMEN-KP/2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.57/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.58/PERMEN-KP/2014 tentang Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Pelaksanaan Kebijakan Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap, Alih Muatan (Transshipment) di Laut dan Penggunaan Nahkoda dan Anak Buah Kapal (ABK) Asing.
21. Keputusan Menteri No 52A/MEN/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi.
22. Keputusan Dirjen Perikanan Tangkap RI No.18/DJPT/2009 tentang Penetapan Pelabuhan Perikanan Sebagai Lokasi Penerapan Ketentuan Port State Measures;
23. Keputusan Dirjen Perikanan Tangkap RI No.09/KEP-DJPT/2013 tentang Penetapan Kepala Dinas Provinsi dan Kepala UPT Pelabuhan Perikanan yang dapat Melakukan Perpanjangan SIPI dan SIKPI Kapal Berukuran di Atas 30 (Tiga Puluh) sampai dengan 60 (Enam Puluh) GT.
24. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap No 264/DPT.0/PI.540.S4/1/09 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sertifikasi Kelaikan Penanganan dan Penyimpanan Ikan di Kapal Penangkap/Pengangkut Ikan dan Inspeksi Pembongkaran Ikan di Pelabuhan.
25. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap No KEP.84/PERDJPT/2013 Tentang Sertifikasi Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) Pada Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan.

## 1.5 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 20/PERMEN- KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan, bahwa Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan, serta keselamatan operasional kapal perikanan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pelabuhan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan, dan evaluasi pelabuhan perikanan;
- b. pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan;
- c. pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan;
- d. pelaksanaan pemeriksaan Log Book;
- e. pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;
- f. pelaksanaan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan;
- g. pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
- h. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan, dan pengawasan, serta pengendalian sarana dan prasarana;
- i. pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, serta pengolahan, pemasaran dan distribusi hasil perikanan;
- j. pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha;
- k. pelaksanaan pengumpulan data, informasi, dan publikasi;
- l. pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB);
- m. pelaksanaan inspeksi pembongkaran ikan;
- n. pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan; dan
- o. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan dijabarkan kedalam struktur organisasi dengan masing-masing tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Seksi Operasional Pelabuhan

Melaksanakan pelayanan teknis operasional kepelabuhanan, kapal perikanan, dan kesyahbandaran. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Operasional Pelabuhan menyelenggarakan fungsi:

- a) pelaksanaan pengumpulan data, informasi, dan publikasi;
- b) pelaksanaan penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB);
- c) pelaksanaan inspeksi pembongkaran ikan;

## 2. Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha

Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pemeliharaan, pemanfaatan, pengembangan, dan pengendalian sarana dan prasarana, serta fasilitasi di pelabuhan perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Tata Kelola dan Pelayanan Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a) Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian, serta pendayagunaan sarana dan prasarana;
- b) pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, pengolahan, dan pemasaran, serta distribusi hasil perikanan;
- c) pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha; dan
- d) pelaksanaan bimbingan teknis tata kelola dan pelayanan usaha.

## 3. Seksi Kesyahbandaran

- a) Pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan;
- b) Pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Laport
- c) Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan;
- d) pelaksanaan pemeriksaan Log Book;
- e) pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;
- f) pelaksanaan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan;
- g) pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;

## 4. Sub Bag Tata Usaha

Mempunyai tugas pelaksanaan dan penyusunan rencana dan program, dan anggaran, rumah tangga, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian, keuangan, umum, pengelolaan Barang Milik

Negara, pengendalian lingkungan, serta pelayanan masyarakat perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a) pelaksanaan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b) pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, umum;
- c) pengelolaan Barang Milik Negara;
- d) pelaksanaan pengendalian lingkungan;
- e) pelaksanaan pelayanan masyarakat perikanan;
- f) pelaksanaan urusan rumah tangga; dan
- g) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Pelabuhan Perikanan.

## **1.6 Maksud dan Tujuan**

Dengan mempertimbangkan dinamika tatanan global serta nasional yang berkembang dinamis, menuntut percepatan langkah strategis untuk menyesuaikan dan memenuhi tantangan lingkungan strategis yang bergerak cepat, melalui penjabaran kebijakan secara berjenjang.

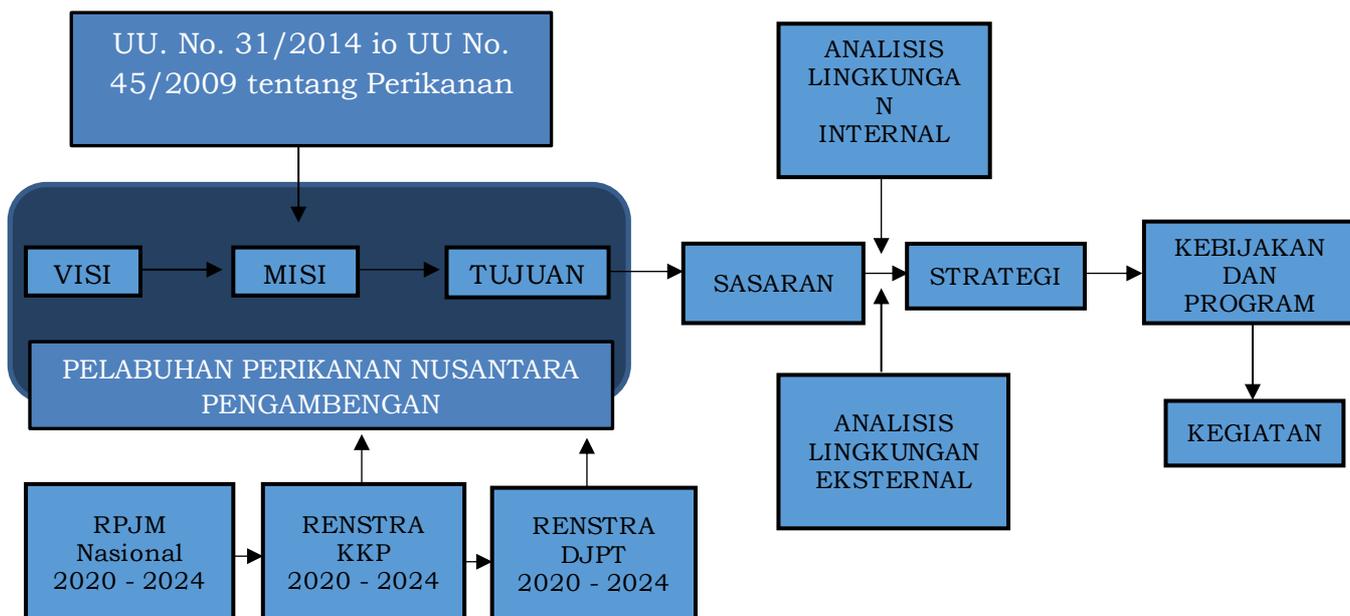
Maksud dan tujuan adanya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan tahun 2020 – 2024, adalah merupakan arah dan pedoman pengembangan dan operasional guna mencapai hasil yang diinginkan dalam periode kurun waktu 5 tahun ke depan, yaitu tahun 2020 s/d 2024. Dalam pelaksanaannya Rencana Strategis dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) secara sistematis dan berkesinambungan. Rencana Strategis dimaksud diuraikan kedalam program dan kegiatan dengan memperhitungkan peluang, tantangan, ancaman dan hambatan yang mungkin timbul.

Rencana Strategis tersebut juga merupakan komitmen organisasi dan sekaligus diharapkan mampu memberikan motivasi dan petunjuk kepada stakeholders yang terlibat dalam aktifitas operasional pelabuhan.

## **1.7 Alur Pikir**

Alur pikir penyusunan Renstra Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan tersaji pada gambar dibawah ini:

Gambar 1.4 Alur pikir penyusunan Renstra



## **BAB 2.**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

#### **2.1 Pembangunan Kelautan dan Perikanan**

Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Visi KKP 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”.

Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan Misi Presiden dalam RPJMN 2020-2024, KKP menjalankan 4 (empat) dari 9 (sembilan) Misi Presiden yaitu:

- a. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, melalui Peningkatan Daya Saing SDM KP dan pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan;
- b. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
- c. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan, melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan
- d. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Tujuan Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Menjabarkan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah :

1. Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan, yakni:
  - a. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM Kelautan dan Perikanan; dan
  - b. Menguatnya inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan;
2. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional, yakni:

- a. optimalnya pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
  - b. Meningkatkan mutu, daya saing dan penguatan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan;
  - c. Meningkatnya pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan;
  - d. Meningkatnya system perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; dan
  - e. Optimalnya pengelolaan ruang laut.
3. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dengan pulau –pulau kecil; dan
  4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP, dengan tujuan meningkatnya kinerja reformasi birokrasi KKP.

## **2.2 Pembangunan Perikanan Tangkap**

### **2.2.1 Visi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap**

Visi Ditjen Perikanan Tangkap tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Perikanan Tangkap yang Maju dan Berkelanjutan serta Masyarakat Perikanan Tangkap yang Sejahtera” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong- Royong”.

### **2.2.2 Misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap**

Ditjen Perikanan Tangkap melaksanakan 4 (empat) Misi Presiden, dengan uraian sebagai berikut :

- a. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, melalui peningkatan SDM Masyarakat Perikanan Tangkap;
- b. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, melalui peningkatan kontribusi ekonomi sub sector perikanan tangkap;
- c. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui peningkatan keberlanjutan sumberdaya perikanan tangkap; dan
- d. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui peningkatan tata kelola Pemerintahan di lingkup DJPT.

### **2.2.3 Tujuan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap**

Menjabarkan misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, maka tujuan pembangunan pembangunan perikanan tangkap adalah :

1. Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat Perikanan Tangkap, yaitu meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM Perikanan tangkap termasuk memberdayakan nelayan;
2. Peningkatan kontribusi ekonomi subsector perikanan tangkap, yaitu :
  - a. Optimalnya integrasi pengembangan infrastruktur dan operasionalisasi pelabuhan perikanan;
  - b. Mengembangkan armada perikanan tangkap nasional yang kompetitif dan produktif ;
  - c. Mengakselerasi reformasi tata kelola perizinan usaha perikanan tangkap;
3. Peningkatan keberlanjutan sumberdaya perikanan tangkap, yaitu optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya ikan berbasis WPP-NRI; dan
4. Peningkatan tata kelola pemerintahan di lingkup DJPT, yaitu meningkatnya kinerja reformasi birokrasi DJPT secara berkualitas.

Sesuai dengan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan dalam mengedepankan strategi Pro Poor, Pro Job, Pro Growth, Pro Business dan Pro Sustainable guna mendorong pemulihan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan, serta memperhatikan lingkungan strategis yang bergerak dinamis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Renstra Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, maka dalam rangka mencapai visi yang tertuang dalam Renstra Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis.

#### **2.2.4 Sasaran Program Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap**

Sasaran program perikanan tangkap merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh DJPT sebagai suatu outcome/impact dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan, serta untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan.

Sasaran Program DJPT 2020-2024 sebagai berikut:

- a. Kesejahteraan nelayan meningkat, untuk mendukung SS-1 KKP (kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat).

Indikator kinerja: Nilai Tukar Nelayan (NTN) (indeks), dengan target 102 (seratus dua) pada tahun 2020 menjadi 107 (seratus tujuh) pada tahun 2024.

- b. Sumber daya perikanan tangkap berkelanjutan, untuk mendukung SS-3 KKP (Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan).

Indikator kinerja: proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (persen), dengan target  $\leq 64$  pada tahun 2020 menjadi  $\leq 80$  pada tahun 2024.

- c. Tata kelola sumber daya perikanan tangkap bertanggung jawab, untuk mendukung SS-6 KKP (tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan bertanggung jawab).

Indikator kinerja: WPPNRI yang menjadi model percontohan penguatan tata kelola (WPPNRI), dengan target 3(tiga) pada tahun 2020 menjadi 11(sebelas) pada tahun 2024.

- d. Produktivitas perikanan tangkap meningkat, untuk mendukung SS-7 KKP (Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing).

Indikator kinerja yaitu:

- 1) jumlah produksi perikanan tangkap (juta ton), dengan target 8,020 pada tahun 2020 menjadi 10,105 pada tahun 2024.
- 2) Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) dibawah tanggung jawab DJPT (skala kemandirian 1-5), dengan target 4 (empat) pada tahun 2020 menjadi 4 (empat) pada tahun 2024.

- e. Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan DJPT, untuk mendukung SS-9 KKP (tata kelola pemerintahan yang baik).

Indikator kinerja yaitu:

- 1) nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) DJPT (nilai), dengan target 30 (tiga puluh) pada tahun 2020 menjadi 34 (tiga puluh empat) pada tahun 2024;
- 2) Indeks Profesionalitas (IP) ASN DJPT (indeks), dengan target 72 (tujuh puluh dua) pada tahun 2020 menjadi 76 (tujuh puluh enam) pada tahun 2024
- 3) unit kerja yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (satker), dengan target 8 (delapan) pada tahun 2020 menjadi 12 (dua belas) pada tahun 2024;
- 4) batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK DJPT dibandingkan realisasi anggaran Ditjen Perikanan Tangkap (persen), dengan target  $\leq 1$  pada tahun 2020 menjadi  $\leq 1$  pada tahun 2024;

- 5) nilai PM SAKIP DJPT (nilai), dengan target 85 (delapan puluh lima) pada tahun 2020 menjadi 85,75 (delapan puluh lima koma tujuh puluh lima) pada tahun 2024;
- 6) level maturitas SPIP DJPT (level), dengan target 3 (tiga) pada tahun 2020 menjadi 3 (tiga) pada tahun 2024;
- 7) persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen), dengan target 82 (delapan puluh dua) pada tahun 2020 menjadi 90 (sembilan puluh) pada tahun 2024
- 8) persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPT (persen), dengan target 60 (enam puluh) pada tahun 2020 menjadi 80 (delapan puluh) pada tahun 2024;
- 9) unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (unit kerja), dengan target 1 (satu) pada tahun 2020 menjadi 1 (satu) pada tahun 2024;
- 10) nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPT (nilai), dengan target 88 (delapan puluh delapan) pada tahun 2020 menjadi 90 (sembilan puluh) pada tahun 2024; dan
- 11) nilai Kinerja Anggaran (NKA) DJPT (nilai), dengan target 85 (delapan puluh lima) pada tahun 2020 menjadi 89 (delapan puluh sembilan) pada tahun 2024.

### **2.2.5 Visi dan Tujuan PPN Pengembangan**

Visi PPN Pengembangan tahun 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Perikanan Tangkap yang Maju dan Berkelanjutan serta Masyarakat Perikanan Tangkap yang Sejahtera” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”.

#### **Misi**

Misi PPN Pengembangan juga mengadopsi misi Ditjen Perikanan Tangkap melaksanakan 4 (empat) Misi yaitu :

- a. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, melalui peningkatan SDM Masyarakat Perikanan Tangkap;
- b. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, melalui peningkatan kontribusi ekonomi sub sector perikanan tangkap;

- c. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui peningkatan keberlanjutan sumberdaya perikanan tangkap; dan
- d. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui peningkatan tata kelola Pemerintahan di lingkup PPN Pengambengan.

### **Tujuan**

Menjabarkan misi Ditjen Perikanan Tangkap, maka tujuan PPN Pengambengan juga mendukung maka tujuan Ditjen Perikanan Tangkap yaitu:

1. Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat Perikanan Tangkap, yaitu meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM Perikanan tangkap termasuk memberdayakan nelayan;
2. Peningkatan kontribusi ekonomi subsector perikanan tangkap, yaitu :
  - a. Optimalnya integrasi pengembangan infrastruktur dan operasionalisasi pelabuhan perikanan;
  - b. Mengembangkan armada perikanan tangkap nasional yang kompetitif dan produktif ;
  - c. Mengakselerasi reformasi tata kelola perizinan usaha perikanan tangkap;
3. Peningkatan keberlanjutan sumberdaya perikanan tangkap, yaitu optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya ikan berbasis WPP-NRI; dan
4. Peningkatan tata kelola pemerintahan di lingkup PPN Pengambengan, yaitu meningkatnya kinerja reformasi birokrasi PPN Pengambengan secara berkualitas.

### **2.2.6 Sasaran Strategis**

Dalam mencapai visi, misi dan tujuan, PPN Pengambengan menetapkan sasaran strategis yaitu kondisi yang ingin dicapai PPN Pengambengan sebagai suatu outcome/impact dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pelabuhan perikanan. Pada tahun 2020-2024, PPN Pengambengan menetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis, yaitu:

1. Nilai PNBPN Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di PPN Pengambengan
  - a) Penerimaan PNBPN Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan (Rp Juta)

- ✓ Jumlah pemenuhan pelaporan PNBPN di UPT PPN Pengembangan (dokumen).
- 2. Produktivitas Perikanan Tangkap di PPN Pengembangan
  - a) Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPN Pengembangan (Ton)
    - ✓ Validasi nilai perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (dokumen)
- 3. Pengelolaan PPN Pengembangan yang berdaya saing
  - a) Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Pengembangan (Persen)
    - ✓ Jumlah permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Pengembangan (dokumen)
  - b) Tingkat Kinerja PPN Pengembangan (Nilai)
    - ✓ Nilai Tingkat kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan berdasarkan data Evkin (Aplikasi)
  - c) Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)
    - ✓ Jumlah pelayanan kesyahbandaran yang diterbitkan PPN Pengembangan (dokumen)
- 4. Pengembangan dan peningkatan fasilitas PPN Pengembangan yang optimal
  - ✓ Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)
  - ✓ Penjumlahan pengembangan fasilitas di PPN Pengembangan
  - a) Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)
    - ✓ Nilai pengendalian lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan berdasarkan data Selaraskan (Aplikasi)
- 5. Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di PPN Pengembangan
  - ✓ Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)
  - ✓ Jumlah dokumen kapal perikanan yang diterbitkan oleh PPN Pengembangan
- 6. Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi/Terlindungi di PPN Pengembangan
  - a) Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan (Persen)
    - ✓ Data nelayan/awak kapal perikanan yang telah menerima

pelatihan sertifikasi awak kapal (Dokumen)

7. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan

a) Nilai Pembangunan Zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan (Nilai)

- ✓ Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Area Manajemen Perubahan
- ✓ Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Area Penataan Tata Laksana
- ✓ Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Area Penataan Sistem Manajemen SDM
- ✓ Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Area Penguatan Akuntabilitas
- ✓ Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Area Penguatan Pengawasan
- ✓ Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- ✓ Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Komponen Hasil

b) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja PPN Pengambengan (Persen)

- ✓ Nilai persentase atas penyelesaian laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK PPN Pengambengan

c) Nilai Rekonsiliasi Kinerja (Nilai)

- ✓ Nilai Perencanaan Strategik, Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja dari Unit Kerja.

d) IP ASN PPN Pengambengan (indeks)

- ✓ IP ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan

e) Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Satker PPN Pengambengan (Persen)

- ✓ Nilai dari beberapa unsur berikut :
  - Rencana umum pengadaan telah di upload ke dalam aplikasi SIRUP (20%);
  - Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%);
  - Laporan penyelenggaraan Barang/Jasa Kesesuaian tahap

pelaksanaan (30%)

- f) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN PPN Pengambengan (Persen)
  - ✓ Nilai dari kegiatan yang dilakukan secara baik dan profesional dalam pengelolaan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah
- g) Nilai IKPA PPN Pengambengan (Nilai)
  - ✓ Realisasi Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan
- h) Nilai Kinerja Anggaran PPN Pengambengan (Nilai)
  - ✓ Realisasi anggaran UPT Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan (%)
- i) Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan
  - ✓ Nilai survey dari masyarakat melalui Si Susun KKP (Aplikasi)

## **BAB 3.**

### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

#### **3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan**

Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan 2020-2024 disusun berdasarkan Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional yang terkait dengan sektor kelautan dan perikanan. Arah dan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan disusun untuk menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan sebagai berikut:

1. memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan perizinan, pengembangan pelabuhan perikanan, pengaturan penangkapan ikan sampai ZEEI dan laut lepas, perlindungan dan pemberdayaan nelayan untuk peningkatan pendapatan nelayan;
2. mengoptimalkan dan memperkuat industrialisasi perikanan budidaya untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan nilai tambah, serta penyediaan sumber protein hewan untuk konsumsi masyarakat
3. membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil kelautan dan perikanan;
4. pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, dan karantina ikan melalui koordinasi dengan instansi terkait; dan
5. penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan.

Untuk mencapai 5 (lima) arah kebijakan di atas, Kementerian Kelautan dan Perikanan melaksanakan kebijakan tata kelola pemerintahan yang baik yang dilakukan oleh seluruh unit kerja di pusat dan daerah.

Secara khusus arah kebijakan untuk sub sektor perikanan tangkap yaitu memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan perizinan, pengembangan pelabuhan perikanan, pengaturan penangkapan ikan sampai ZEEI dan laut lepas, serta perlindungan dan pemberdayaan nelayan untuk peningkatan pendapatan nelayan. Strategi yang akan dilaksanakan meliputi:

1. membuka komunikasi dengan stakeholders untuk harmonisasi kebijakan berbasis data, informasi dan pengetahuan yang faktual;
2. optimalisasi pengelolaan sumber daya ikan berbasis WPPNRI, termasuk optimalisasi kelembagaannya, baik WPPNRI di laut maupun perairan darat;
3. penguatan penyediaan dan pemanfaatan data stok sumber daya ikan sebagai basis pengelolaan sumber daya ikan yang maju dan berkelanjutan;
4. perbaikan, penataan, dan penyederhanaan perizinan berusaha di
5. pusat dan daerah, termasuk sinergi dengan instansi lain yang terkait;
6. pengembangan pelabuhan perikanan prioritas di daerah, pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan (eco fishing port), dan pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan pasar ikan bertaraf internasional (Major Project RPJMN 2020-2024), dengan berkoordinasi dengan K/L terkait, pemerintah daerah, dan badan usaha;
7. eksplorasi perikanan di ZEEI dan laut lepas;
8. fasilitasi dan pengembangan skema pembiayaan yang murah dan mudah diakses, serta optimalisasi peran Badan Layanan Umum- Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU-LPMUKP)/Bank Nelayan;
9. peningkatan kesejahteraan, pemberdayaan nelayan termasuk kelompok nelayan perempuan, diversifikasi usaha nelayan, perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil, penguatan kelembagaan nelayan, pengembangan kampung nelayan maju, bantuan premi asuransi nelayan, perluasan skema asuransi mandiri, sertifikasi hak atas tanah nelayan, perlindungan hak asasi manusia perikanan;
10. penguatan kelompok usaha bersama melalui pembentukan korporasi nelayan (Major Project RPJMN 2020-2024), berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian, BUMN, Pemerintah Daerah, dan Swasta;
11. pengelolaan perikanan di perairan darat;

12. pengembangan armada perikanan, alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang ramah lingkungan;
13. partisipasi dalam organisasi pengelolaan perikanan regional yang melingkupi perairan Indonesia/Regional Fisheries Management Organization (RFMOs);
14. pengaturan akses nelayan terhadap pengelolaan sumberdaya, kemudahan fasilitasi usaha dan investasi, dan pengembangan perikanan berbasis digital;
15. pengembangan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT); dan
16. penguatan unit pelaksana teknis perikanan tangkap.

Adapun secara umum untuk melaksanakan kelima arah kebijakan KKP tersebut juga perlu adanya penguatan penerapan sistem tata kelola pemerintahan yang baik. Strategi yang akan dilaksanakan adalah peningkatan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN), penguatan penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran dan kualitas laporan Keuangan KKP, peningkatan kualitas pelaksanaan SAKIP KKP, serta penguatan pembangunan budaya integritas dan pengawasan internal.

Pengarusutamaan dalam Renstra 2020-2024 Kementerian Kelautan dan Perikanan mengacu pada Dokumen RPJMN 2020-2024 yang telah menetapkan 4 (empat) pengarusutamaan (mainstreaming) sebagai bentuk pembangunan inovatif-adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Keempat mainstreaming ini akan mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif. Selain mempercepat pencapaian target-target dari fokus pembangunan, pengarusutamaan ini juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan. Arah kebijakan pengarusutamaan pembangunan kelautan dan perikanan 2020-2024 dijabarkan sebagai berikut:

#### 1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) mencakup 17 (tujuh belas) tujuan/goal, 169 (seratus enam puluh sembilan) target, dan 241 (dua ratus empat puluh satu) indikator. Dalam

melaksanakan TPB/SDGs, diperlukan keterkaitan antardimensi pembangunan yang saling berpengaruh. Dimensi pembangunan yang dimaksud meliputi dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. KKP akan memperkuat komitmen pelaksanaan target TPB Nomor 14 yakni ekosistem lautan (life below water) yang mencakup diantaranya:

- a. mengurangi pencemaran laut termasuk sampah laut;
- b. meningkatkan kapasitas/pengetahuan masyarakat kelautan dan perikanan dalam pengelolaan wilayah pesisir berbasis mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim;
- c. mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan;
- d. meminimalisasi dan mengatasi dampak pengasaman laut;
- e. mengatur kuota penangkapan per wilayah agar sumber daya ikan tetap berkelanjutan;
- f. melestarikan wilayah pesisir dan laut;
- g. mengatur subsidi perikanan agar tidak berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebih;
- h. meningkatkan manfaat ekonomi atas pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut termasuk melalui pengelolaan perikanan, budidaya air, dan pariwisata berkelanjutan;
- i. meningkatkan pengetahuan ilmiah, mengembangkan kapasitas penelitian, dan alih teknologi kelautan;
- j. menyediakan akses untuk nelayan skala kecil terhadap sumber daya laut dan pesisir; dan
- k. meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya melalui penegakan hukum internasional yang tercermin dalam the United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).

## 2. Gender

Pengarusutamaan gender (PUG) diarahkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai sektor dalam pembangunan,

dengan strategi meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pembangunan kelautan dan perikanan. Strategi yang akan dilakukan adalah percepatan pelaksanaan PUG di semua bidang pembangunan di tingkat pusat, dan daerah, yang mencakup:

- a. penguatan 7 (tujuh) prasyarat PUG, yakni komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data terpilah, alat analisis, partisipasi masyarakat;
- b. penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG);
- c. penyiapan roadmap PUG;
- d. pengembangan model pelaksanaan PUG terintegrasi antar unit eselon I di KKP dan antar pusat dan daerah;
- e. pembuatan profil gender; dan
- f. monitoring dan evaluasi serta pengawasan Pengarusutamaan Gender (PUG) KKP.

### 3. Modal Sosial Budaya

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (local knowledge), kearifan lokal (local wisdom), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial-budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa. Pembangunan kebudayaan ingin memastikan bahwa setiap penduduk memperoleh perlindungan hak kebudayaan dan kebebasan berekspresi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif. Peningkatan pembangunan inklusif dan berwawasan budaya lingkup KKP, diantaranya:

- a. pelaksanaan pembangunan yang mengindahkan nilai budaya, kearifan lokal dan keragaman SDA hayati;
- b. pengembangan dan penguatan budaya bahari dan literasi bahari; dan
- c. fasilitasi pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di pesisir dan pulau-pulau kecil.

### 4. Transformasi Digital

Pengarustamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarustamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (supply), pemanfaatan (demand) dan pengelolaan big data. Penyiapan layanan digital terintegrasi lingkup KKP yang mencakup penyiapan regulasi, penguatan kelembagaan, pembangunan jaringan, sarpras, meningkatkan kapasitas SDM dengan keahlian digital, melakukan kerja sama untuk menyediakan layanan digital dan one data serta penataan sistem perizinan berbasis web (online), termasuk penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan peningkatan usaha kelautan dan perikanan melalui e-commerce.

## **3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perikanan tangkap**

### **3.2.1 Pendekatan Konseptual**

Pembangunan sebuah subsektor harus mulai dikembangkan ke dalam proses yang lebih dinamis, mempertimbangkan isu terkini, serta berupaya mengantisipasi tantangan di masa mendatang untuk mencapai sebuah tujuan pembangunan. Selain itu dalam kerangka sistem perencanaan nasional, pembangunan sebuah subsektor juga sudah seharusnya memiliki referensi yang erat dengan pembangunan pada skala yang lebih luas yakni sektoral maupun nasional.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan perikanan tangkap terutama dilaksanakan untuk mendukung pembangunan nasional pada agenda 1 (satu) “memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan” dan agenda 2 (dua) “mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan”. Agenda penguatan ketahanan ekonomi akan diwujudkan melalui pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan, serta akselerasi peningkatan nilai tambah. Adapun agenda pengembangan wilayah akan diwujudkan melalui keterpaduan pembangunan dengan memperhatikan pendekatan spasial yang didasarkan bukti data, informasi dan pengetahuan yang baik, akurat dan lengkap.

Bisnis proses perikanan tangkap merupakan sebuah sistem yang menjelaskan bagaimana usaha perikanan tangkap berjalan, mulai dari penjabaran kegiatan input, interaksi antar kegiatan, sampai pada alur pencapaian output dari pembangunan sub-sektor perikanan tangkap. Bisnis proses juga biasanya mengidentifikasi keterlibatan stakeholder serta menjelaskan hubungan keterkaitannya. Dengan demikian hal tersebut menegaskan kembali bahwa dalam konteks perencanaan strategis pembangunan perikanan tangkap, penyertaan kerangka bisnis proses sebagai dasar menjadi bersifat mutlak.

Mengacu pada perkembangan terkini konsep pengelolaan perikanan, manajemen perikanan tangkap akan diperspektifkan ke dalam 3 (tiga) aspek utama yakni:

- a. manajemen nelayan;
- b. manajemen sumber daya ikan; dan
- c. manajemen usaha penangkapan ikan,

yang dijabarkan sebagai berikut:

- a. Manajemen Nelayan

Manajemen nelayan terdiri dari 2 (dua) komponen utama pembentuk yakni dukungan terhadap usaha perikanan nelayan serta dukungan terhadap social security nelayan. Dukungan usaha perikanan bertujuan untuk mengakselerasi usaha penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan, seperti misalnya perbaikan mindset, peningkatan kapasitas terhadap penggunaan teknologi, serta fasilitasi akses pendanaan.

Adapun dukungan terhadap social security bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga nelayan, melalui diversifikasi usaha serta fasilitasi penyaluran jaminan kesehatan, pendidikan, maun perbaikan lingkungan permukiman nelayan. Manajemen nelayan mencakup berbagai komponen kegiatan pada kegiatan kenelayanan.

## b. Manajemen Sumber Daya Ikan

Manajemen Sumber Daya Ikan (SDI) terdiri dari 2 (dua) komponen utama pembentuk yakni pengaturan alokasi (SDI dan izin) serta pemantauan pelaksanaan perizinan. Pengaturan alokasi mencakup instrumen pengalokasian SDI dan izin oleh pemerintah pusat serta proses pemberian izin baik oleh pemerintah pusat, daerah, maupun upaya integrasi izin pusat dan daerah.

Adapun pemantauan pelaksanaan perizinan dilakukan melalui instrumen penerapan e-logbook, penempatan pemantau penangkapan ikan dan pengangkutan ikan, serta peningkatan kepatuhan pada Laporan Kegiatan Usaha-Laporan Kegiatan Penangkapan (LKU-LKP). Optimalisasi manajemen SDI, utamanya akan dapat tercapai seiring konsep pengelolaan berbasis WPPNRI diterapkan secara penuh. Manajemen SDI mencakup berbagai komponen kegiatan pada kegiatan pengelolaan SDI dan kegiatan pengelolaan perizinan.

## c. Manajemen Usaha Penangkapan Ikan

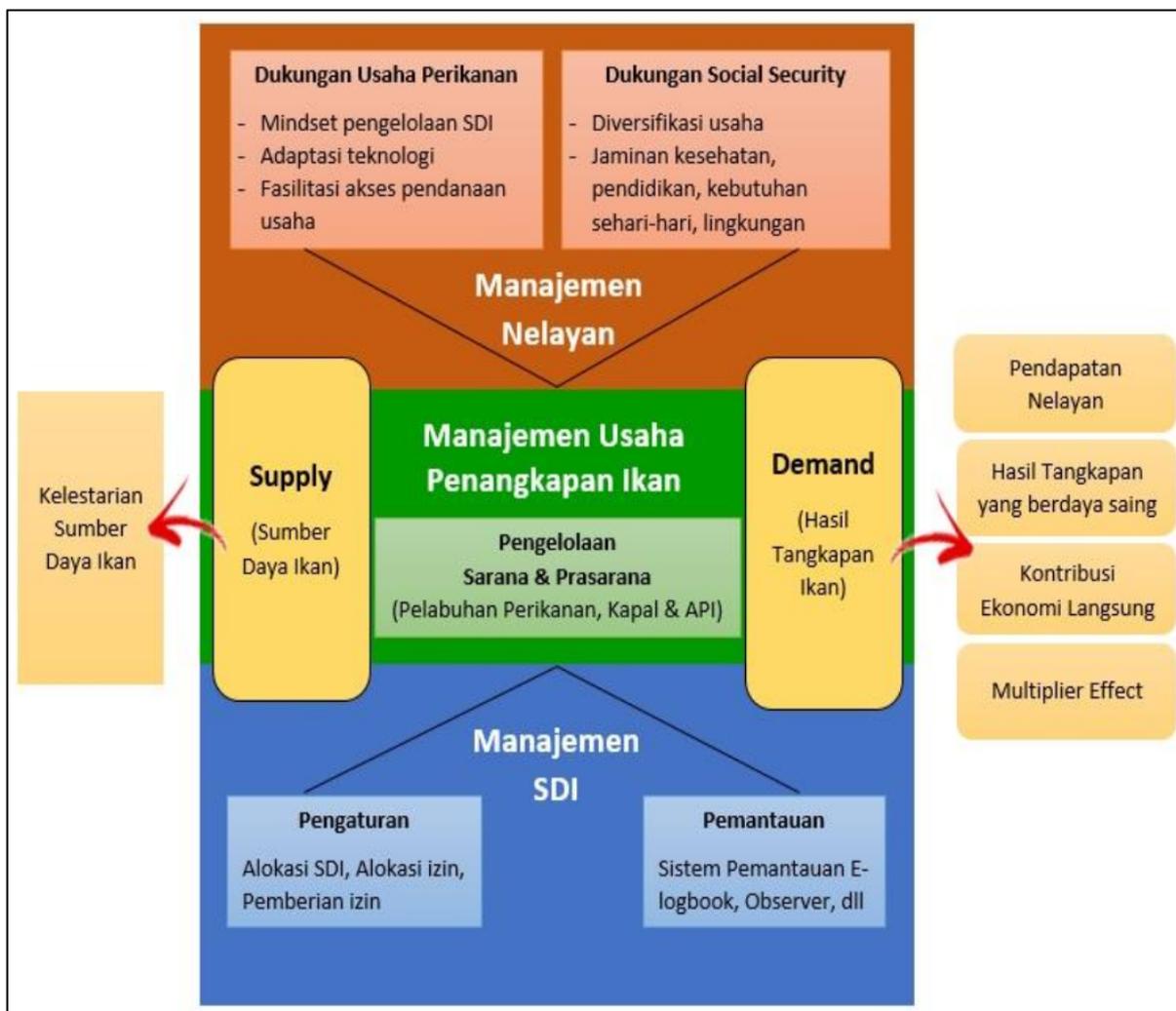
Manajemen usaha penangkapan ikan, berisi segala mekanisme terkait pengaturan pemanfaatan sumber daya ikan oleh nelayan, sehingga sifatnya merepresentasikan irisan antara manajemen sumber daya ikan dan manajemen nelayan. Selain itu, manajemen usaha penangkapan ikan juga dapat dianggap sebagai ujung tombak sinergi antara penyediaan supply (sumber daya ikan) dan pemenuhan demand (hasil tangkapan ikan).

Mengacu pada peran strategis tersebut, manajemen usaha penangkapan ikan sebenarnya menjadi tahapan yang paling penting dalam mencapai berbagai outcome pembangunan perikanan tangkap, yakni meliputi peningkatan kelestarian sumber daya ikan, pendapatan nelayan, daya saing hasil tangkapan, kontribusi ekonomi langsung, serta multiplier effect lainnya. Manajemen sumber daya ikan mencakup berbagai komponen kegiatan pada kegiatan pengelolaan pelabuhan perikanan, dan kegiatan pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan.

Semakin tingginya faktor permintaan terhadap produk perikanan serta adanya potensi keterbatasan dukungan ekosistem perikanan, seringkali semakin mendorong ketidakseimbangan terhadap usaha penangkapan ikan yang ideal. Pembelajaran pada periode

pembangunan sebelumnya tahun 2015-2019 semakin memperlihatkan bahwa tren pengelolaan perikanan tangkap di masa mendatang akan semakin mengerucut pada permasalahan supply dan demand. Untuk memenuhi keseimbangan supply dan demand tersebut, hubungan 3 (tiga) aspek utama dalam konsep manajemen perikanan harus berjalan secara seimbang, yakni antara aspek sosial, ekonomi serta aspek lingkungan ataupun seringkali direpresentasikan melalui hubungan antara stakeholder nelayan, pengusaha, dengan pemerintah sebagaimana terdapat pada **Gambar 3.1**. Penggunaan pendekatan supply-demand juga dilakukan dalam rangka mewujudkan arah kebijakan utama industrialisasi sektor kelautan dan perikanan yang telah dicanangkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.

Gambar 3.1 Implementasi Pendekatan Supply-Demand terhadap Manajemen Perikanan Tangkap



### 3.2.2 Arah Kebijakan dan Strategi

Secara khusus, kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan pada pembangunan subsektor perikanan tangkap diarahkan untuk memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan izin, pengembangan pelabuhan, penangkapan ikan sampai dengan ZEEI dan laut lepas, serta peningkatan pendapatan melalui akses permodalan, perlindungan dan perbaikan hidup nelayan.

Untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut di atas, DJPT telah melakukan penterjemahan arah kebijakan pembangunan perikanan tangkap ke dalam 2 (dua) arah kebijakan, termasuk berbagai indikasi strategi pelaksanaan, serta penetapan kegiatan prioritas di dalamnya, sebagai berikut:

Gambar 3.2 Pendekatan perencanaan strategis subsector perikanan tangkap, arah kebijakan utama, serta kegiatan prioritas tahun 2020 – 2024



#### a. Kebijakan Pokok

- 1) Memperbaiki komunikasi dengan nelayan dan stakeholder untuk perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan berbasis data, informasi, dan pengetahuan yang faktual. Kebijakan ini dilakukan melalui pendekatan:
  - a) kajian atas regulasi dalam rangka percepatan investasi subbidang perikanan tangkap;
  - b) konsultasi publik dengan stakeholder untuk perumusan kebijakan;

- c) pendekatan ilmiah/akademik berbasis data dan pengetahuan faktual dalam perumusan kebijakan;
- d) koordinasi dengan Kementerian Koordinator dan laporan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk penetapan kebijakan perikanan tangkap; dan
- e) kunjungan kerja dan diskusi stakeholder di pelabuhan perikanan dan sentra nelayan.

Arah kebijakan ini dilakukan dengan basis pendekatan data faktual, keterbukaan informasi secara bertanggung jawab berbasis website dan transparansi, serta berbasis riset dan pengetahuan faktual.

- 2) Pengelolaan sumber daya perikanan tangkap yang berkelanjutan.

Pengelolaan perikanan tangkap dilakukan melalui peningkatan efektivitas tata kelola sumber daya perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a) pengembangan armada perikanan tangkap nasional yang kompetitif dan produktif

Utamanya akan dilakukan melalui utilisasi armada perikanan tangkap sebagai sarana prasarana utama produksi. Operasional kapal perikanan, selektivitas penggunaan alat penangkapan ikan, serta kapasitas awak kapal perikanan dapat dianggap sebagai ujung tombak dalam upaya menciptakan pengelolaan perikanan yang seimbang. Dalam hal ini artinya diharapkan perangkat armada perikanan tangkap tersebut, bukan hanya mampu menghasilkan volume produksi yang tinggi, namun juga produk perikanan yang lebih berdaya saing, serta sekaligus dapat menjaga stabilitas ekosistem perikanan dan daya dukung lingkungan.

Tingginya peluang pemanfaatan sumber daya perikanan di wilayah perairan Indonesia, serta rencana akselerasi di ZEEI dan laut lepas perlu direspon melalui konsep industrialisasi armada penangkapan ikan, yakni meliputi: peningkatan efisiensi-kemampuan jangkauan operasional, kualitas hasil tangkapan, serta jaminan ketenagakerjaan. Sistem manajemen

armada pun (pendaftaran, penandaan, persetujuan dan evaluasi operasional) perlu diperkuat pada lingkup nasional untuk dapat mewujudkan konsep industrialisasi yang berkelanjutan.

Restrukturisasi armada perikanan harus menciptakan kinerja yang lebih efisien melalui adopsi teknologi ramah lingkungan yang telah teradaptasi kearifan lokal. Pelibatan masyarakat dalam setiap proses pengelolaan pun perlu ditingkatkan sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan pemahaman maupun kapasitas nelayan dalam pemanfaatannya.

Dalam upaya mewujudkan peningkatan produktivitas armada perikanan tangkap, beberapa indikasi kegiatan secara spesifik diarahkan untuk:

- 1) restrukturisasi dan modernisasi kapal perikanan, alat penangkapan ikan, mesin dan alat penangkapan ikan;
- 2) peningkatan produktivitas penggunaan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang ramah lingkungan;
- 3) peningkatan standardisasi kapal perikanan yang memenuhi aspek laik laut, laik tangkap dan laik simpan;
- 4) peningkatan standar rancang bangun, keselamatan dan keamanan kerja di kapal perikanan;
- 5) peningkatan nilai ekonomi ikan hasil tangkapan melalui peningkatan kualitas ikan dengan penerapan Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB);
- 6) manajemen tata kelola (pendaftaran, penandaan, persetujuan pembangunan kapal dan pemantauan operasional) kapal perikanan nasional secara elektronik dan terintegrasi;
- 7) optimalisasi dan mekanisasi penangkapan ikan dengan penerapan rekayasa teknologi penangkapan pada alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan dan armada perikanan tangkap; dan
- 8) perlindungan dan peningkatan kapasitas awak kapal perikanan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bidang perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan awak kapal perikanan.

### **Lingkungan strategis yang perlu diperhatikan**

1. Pengembangan industri perkapalan nasional, untuk mendukung pergerakan industri perikanan nasional;
2. Intensifikasi tata kelola kapal perikanan nasional, khususnya pada kapal izin daerah dan kapal perikanan swasta;
3. Peningkatan keterlibatan pada tata kelola awak kapal perikanan;
4. Peningkatan manajemen data armada perikanan

- b) Penyediaan infrastruktur dan operasionalisasi pelabuhan perikanan unggul, terintegrasi, dan berwawasan lingkungan

Implementasi pengembangan infrastruktur berdasarkan bisnis proses usaha perikanan tangkap menjadi kunci utama dalam mewujudkan industrialisasi; dengan mengedepankan outcome berupa efisiensi pengelolaan dan nilai tambah hasil tangkapan ikan. Sinergi pengembangan infrastruktur diarahkan bukan hanya bersifat antar sektor, melainkan juga antar wilayah, serta diperkuat dengan peningkatan konektivitas melalui intensifikasi teknologi informasi dengan basis data yang lebih akurat. Secara umum arah kebijakan ini dimaksudkan untuk mendorong sistem infrastruktur pelabuhan perikanan yang terintegrasi dari hulu ke hilir, bermutu dan berdaya saing; termasuk integrasinya dengan sektor terkait, seperti industri, jasa, dan perhubungan/transportasi.

Pengelolaan perikanan berbasis WPPNRI pun mendorong secara spesifik peran infrastruktur pelabuhan perikanan agar semakin diarahkan sebagai sentra lokasi dari setiap kegiatan perikanan tangkap di setiap WPPNRI, serta untuk semakin mewujudkan konektivitas logistik ikan baik untuk pasar dalam negeri maupun luar negeri. Artinya pelabuhan perikanan mulai memiliki tanggung jawab kewilayahan dalam menjalankan fungsinya. Untuk mendukung hal tersebut, melalui kegiatan prioritas

“Pelabuhan Perikanan Unggul”, fasilitas pelabuhan perikanan akan terus dikembangkan pada tahap lebih lanjut, serta ditingkatkan perannya.

Dalam upaya penyediaan infrastruktur perikanan tangkap yang terintegrasi, beberapa indikasi kegiatan secara spesifik diarahkan untuk:

- 1) pembangunan/pengembangan pelabuhan perikanan sesuai Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional termasuk pembangunan pelabuhan perikanan bertaraf internasional (major project RPJMN);
- 2) penerapan standarisasi pelabuhan perikanan ramah lingkungan melalui *Eco fishing Port*, termasuk didalamnya penguatan instrumen SHTI, serta penerapan CPIB dan inspeksi pembongkaran ikan;
- 3) penguatan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) untuk mendukung keterpaduan data dalam *Data Sharing System* (DSS);
- 4) penguatan SDM pengelola pelabuhan perikanan termasuk penambahan Syahbandar perikanan;
- 5) standardisasi ketersediaan kualitas fisik sarana prasarana, operasional, fungsi pelayanan (ISO-9001), serta penetapan aspek hukum di Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan (WKOPP);
- 6) peningkatan sinergi bisnis perikanan terutama dengan sistem pengolahan dan pemasaran, termasuk melalui integrasinya dengan pasar ikan bertaraf internasional;
- 7) peningkatan keterpaduan pelabuhan perikanan UPT pusat dan UPTD dalam mengimplementasikan Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional (RIPPN); baik dari aktivitas, data dan informasi, serta peningkatan konektivitasnya melalui sistem IT, termasuk melalui pengembangan pelabuhan perikanan prioritas di daerah maupun alternatif peningkatan kelembagaannya;
- 8) penguatan manajemen risiko fasilitas, termasuk terhadap faktor alam (pendangkalan, bencana alam); dan
- 9) peningkatan fungsi operasional SKPT Merauke, SKPT Natuna, SKPT Sebatik, dan SKPT Saumlaki.

<b>Lingkungan strategis yang perlu diperhatikan</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alternatif pembiayaan dalam pembangunan fisik infrastruktur pelabuhan perikanan</li> <li>2. Sinergitas beberapa regulasi sebagai landasan pengembangan PP; terkait a) Pemerintahan Daerah, khususnya pada proses pengalihan P3D (Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen) PP dan b) RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</li> <li>3. Optimalisasi peningkatan peran PP sebagai sentra ekonomi dan pusat aktivitas nelayan; utamanya untuk memudahkan fungsi kontrol pemerintah</li> <li>4. Intensifikasi tata kelola pengembangan PP secara nasional, baik yang melalui penganggaran APBN KKP, DAK, APBD maupun swasta.</li> </ol>

c) Optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan berbasis WPPNRI

Inisiasi pengelolaan perikanan berbasis WPPNRI telah dilakukan sejak satu dekade terakhir, namun operasionalisasinya belum optimal. Padahal sampai dengan saat ini instrumen kelengkapannya tergolong telah siap, mulai dari Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP), Lembaga Pengelola Perikanan (LPP), infrastruktur dasar, maupun mekanisme pengaturan lainnya. Pengelolaan berbasis WPPNRI diarahkan untuk berperan sebagai management authority yang mempunyai kewenangan penuh dalam mengelola WPPNRI, khususnya dalam pelaksanaan dan evaluasi RPP. Termasuk didalamnya menyelesaikan isu-isu pengelolaan perikanan, serta sebagai wadah koordinasi dan sinergi dari pengelolaan perikanan di masing-masing WPPNRI.

Upaya pemanfaatan sumber produksi akan terus didorong dari lokus-lokus potensial yang selama ini belum optimal intervensinya, seperti pada wilayah perairan darat; mempertimbangkan tidak sedikit daerah yang secara geografis memiliki banyak wilayah perairan darat seperti sungai dan danau. Selain itu semakin strategisnya posisi Indonesia pada

sistem perikanan global sekaligus pertimbangan terhadap kedaulatan NKRI, pemanfaatan usaha penangkapan ikan di ZEEI dan laut lepas juga akan lebih diakselerasi, khususnya pada komoditas unggulan seperti tuna, cakalang, tongkol. Di sisi lainnya peningkatan sistem jaminan ketelusuran terus didorong melalui perluasan cakupan penerapan e-logbook serta penempatan pemantau penangkapan ikan dan pengangkutan ikan pada kapal perikanan.

Dalam upaya optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan berbasis WPPNRI, beberapa indikasi kegiatan secara spesifik diarahkan untuk:

- 1) peningkatan operasionalisasi lembaga WPPNRI dalam pengawasan, pengalokasian SDI, sinergi pembangunan pusat dan daerah dan antar-daerah, serta penyelesaian isu kewilayahan termasuk nelayan andon;
- 2) peningkatan kepatuhan pelaku usaha melalui kepatuhan pelaksanaan e-logbook secara nasional untuk kapal >5 GT, serta perluasan cakupan pemantau penangkapan ikan dan pengangkutan ikan di atas kapal perikanan;
- 3) penguatan basis pengalokasian sumber daya ikan, sebagai dasar optimalisasi pemanfaatan;
- 4) peningkatan produktivitas di ZEEI dan laut lepas, khususnya melalui pemanfaatan investasi tuna, cakalang, tongkol; serta mendorong kerjasama bilateral, regional dan internasional, khususnya pada forum RFMO;
- 5) peningkatan produktivitas perikanan perairan darat, melalui perluasan cakupan pendataan serta pengembangan LP3D (Lembaga Pengelolaan Perikanan Perairan Darat); dan
- 6) mendorong sertifikasi dan sistem ketertelusuran (**traceability**) hasil tangkapan ikan.

**Lingkungan strategis yang perlu diperhatikan**

1. Penguatan basis data pengalokasian SDI, intensifikasi koordinasi dengan otoritas penyusun stok SDI dan akademisi (backward linkage);
2. Penguatan fungsi manajemen pemanfaatan SDI melalui pengendalian perairan overfishing dan optimalisasi perairan underfishing; Intensifikasi koordinasi dengan unit kerja pemanfaatan usaha (forward linkage), seperti dalam hal alokasi izin, kapal, dan pengembangan PP; dan
3. Intensifikasi koordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) terkait operasionalisasi WPPNRI, penyelesaian andon, pemanfaatan perairan darat.

d) Reformasi tata kelola perizinan usaha perikanan tangkap

Upaya pemberantasan Illegal, Unreported, and Unregulated Fisheries (IUUF) sejauh ini telah terbukti mampu berkontribusi pada pemulihan stok sumber daya. Melanjutkan momentum baik tersebut, perizinan didorong untuk menjadi instrumen pengakselerasi usaha (dengan otoritas pemerintah terus melakukan penyederhanaan sistem) yang bertanggungjawab (dengan pelaku usaha semakin tertib aturan).

Dalam rangka mendukung pengelolaan berbasis WPPNRI, alokasi dan evaluasi izin dari otoritas nasional harus menjadi acuan dasar untuk diaplikasikan secara ketat, termasuk di tingkat daerah. Sebagai langkah awal, upaya integrasi perizinan perlu diintensifkan, yakni antar K/L (KKP dan Kementerian Perhubungan) maupun antara pusat-daerah (KKP dan Pemda). Dengan cakupan pengaturan yang luas dan bersifat antar kewenangan tersebut, pemutakhiran penggunaan e-service dan platform yang terintegrasi perlu terus didorong untuk membangun sistem perizinan yang real-time, transparan, dan terukur.

Dalam upaya mengimplementasikan reformasi tata kelola perizinan usaha perikanan tangkap, beberapa indikasi kegiatan secara spesifik diarahkan untuk:

- 1) peningkatan dan penyebarluasan SILAT;

- 2) sinergi mekanisme perizinan usaha penangkapan ikan dengan Kementerian Perhubungan, termasuk upaya integrasi dan penyederhanaan perizinan usaha perikanan tangkap;
- 3) sinergi sistem perizinan pusat dan daerah yang lebih tertata;
- 4) pemutakhiran dan peningkatan inovasi pelaksanaan e services;
- 5) Peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap pelaporan usaha perikanan tangkap; dan
- 6) Implementasi perizinan berdasarkan alokasi usaha penangkapan ikan.

Lingkungan strategis yang perlu diperhatikan
1. Sinergitas regulasi terkait Pemerintahan Daerah; kewenangan perizinan dan penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP) untuk nelayan kecil oleh pemerintah daerah;
2. Sinergitas peraturan daerah (Perda) terkait sistem perizinan, dalam upaya mengintegrasikan sistem perizinan pusat-daerah; dan
3. Inovasi teknologi dalam pelaporan usaha untuk meningkatkan kualitas data pemanfaatan SDI dan potensi pendapatan negara.

e) Pemberdayaan usaha dan perlindungan nelayan

Mengacu pada pembelajaran sebelumnya bahwa program bantuan sebenarnya secara akumulatif dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan nelayan, namun dengan beberapa catatan seperti perlunya pelibatan aktif Pemda maupun nelayan itu sendiri. Dengan demikian kedepannya program serupa perlu didorong agar lebih memperhatikan perspektif stakeholder utama nelayan serta memposisikan DJPT bukan hanya sebagai pelaksana lapangan, melainkan juga koordinator dari sistem perlindungan nelayan yang lebih luas.

Pada dasarnya pemenuhan social security masih menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat miskin termasuk nelayan. Kebutuhan biaya hidup sehari-hari, kesehatan, pendidikan keluarga, serta perbaikan lingkungan,

mendorong nelayan untuk memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi dari hasil penangkapan ikan. Sehingga secara psikologis, nelayan akan sangat sensitif terhadap segala perubahan sistem yang dapat mempengaruhi tingkat penghasilannya. Pemenuhan kebutuhan dasar dimaksudkan juga agar nelayan lebih resisten terhadap ketidakpastian usaha penangkapan ikan, sekaligus untuk membentuk jaringan pengaman sosial yang kuat dalam menghadapi berbagai situasi force majeure seperti bencana alam.

Dalam hal ini peran DJPT perlu dipertegas yakni untuk memfasilitasi peningkatan usaha nelayan serta sebagai koordinator/penyedia data kenelayanan yang akurat untuk memfasilitasi bantuan antar sektor. Peran nelayan maupun pemerintah daerah pun perlu disinergikan untuk dapat mengidentifikasi kebutuhan nelayan secara tepat maupun mencegah timbulnya perbedaan persepsi antara nelayan dan pemerintah.

Dalam upaya pemberdayaan usaha dan perlindungan nelayan, beberapa indikasi kegiatan secara spesifik diarahkan untuk:

- 1) Peningkatan kualitas hidup nelayan melalui pengembangan kampung nelayan maju;
- 2) Penguatan usaha dan perlindungan nelayan melalui program bantuan pemerintah, dan fasilitasi perluasan skema asuransi nelayan mandiri
- 3) Pemberdayaan dan kapasitas nelayan terhadap risiko mata pencaharian melalui diversifikasi usaha, peningkatan kewirausahaan serta literasi manajemen keuangan;
- 4) Penguatan kapasitas kelembagaan usaha nelayan; inovasi akses permodalan baik perbankan maupun non perbankan, termasuk intensifikasinya melalui akses LPMUKP; serta inisiasi pengembangan korporasi nelayan (major project RPJMN);
- 5) Peningkatan kerjasama dalam pemenuhan kebutuhan dasar dari aspek permukiman (KemenPUPR), kesehatan (Kemenkes), Pendidikan (Kemendikbud), lingkungan (KemenLHK), serta fasilitasi setipikasi hak atas tanah nelayan; dan

- 6) Penguatan informasi kenelayan melalui intensifikasi pelibatan daerah dan komunikasi dengan nelayan.

Lingkungan strategis yang perlu diperhatikan
1. Penguatan database kenelayan untuk menjaring kerjasama pemberdayaan-perlindungan nelayan dengan lintas sektor, pemda, swasta; 2. Penguatan jalur & mekanisme komunikasi dengan nelayan untuk pemetaan kebutuhan nelayan secara tepat dan responsif; dan 3. Mengarusutamakan nelayan sebagai subjek pemberdayaan, melalui perubahan mindset dan kapasitas nelayan untuk mandiri; bukan lagi hanya sebagai objek.

- 3) Reformasi Birokrasi DJPT menuju birokrasi yang lebih berkualitas

Reformasi birokrasi dilakukan dalam rangka implementasi RB DJPT berdasarkan prioritas dan kepentingan nasional yang dilakukan melalui 5 (lima) pendekatan, yaitu:

- a) *human capital*;
- b) *organisation capital (rightsizing organisation)*;
- c) *financial and planning capital*;
- d) *information capital*; dan
- e) *control capital*.

Di masa mendatang, tantangan subsektor perikanan tangkap diprediksi akan semakin besar, baik pada lingkup sektoral maupun global. Dengan demikian maka peran organisasi kesekretariatan perlu didorong bukan hanya terfokus pada fungsi administratif kesekretariatan saja melainkan juga mulai memperkuat fungsi sebagai unit kerja think-tank; berperan dalam memberikan berbagai saran- pertimbangan, memberikan respon cepat (*quick analysis*), serta mengembangkan teori dan model pembangunan perikanan tangkap. Kesekretariatan juga perlu lebih membuka diri untuk mempermudah koordinasi lintas sektor.

Dalam rangka mendukung hal tersebut, beberapa strategi secara spesifik diarahkan untuk:

- a) peningkatan inovasi program;
- b) intensifikasi manajemen berbasis IT;

- c) peningkatan skala kerja sama bidang perikanan tangkap baik di lingkup KKP (antar unit kerja Eselon I) maupun Nasional (antar K/L, Pemda, BUMN, swasta);
- d) penerbitan peraturan terkait proses bisnis perikanan yang berkeadilan dan berkelanjutan;
- e) harmonisasi dan revisi regulasi terkait; dan
- f) penguatan manajemen data, dengan pendataan yang lebih menyeluruh.

Gambar 3.3 Pemetaan Dukungan Stakeholder Potensial terhadap Pembangunan Perikanan Tangkap

K/L LAIN	PEMDA	KKP
<b>PU-PERA</b> Jalan / Rumah / Dermaga Pelabuhan / air bersih	Penyiapan lahan	Tata ruang/zonasi/masterplan
<b>KEMEN-ATR</b> Sertifikasi Tanah Nelayan	Identifikasi permasalahan di daerah	Sarana Sistem Rantai Dingin
<b>KEMENDAGRI</b> Percepatan P3D, sinergi pusat-daerah	Identifikasi / pengurusan administrasi / penyaluran bantuan	Penyuluhan, Pelatihan, Penguatan kelembagaan kelompok
<b>KEMEN-KOPERASI</b> Pembentukan / Pembinaan Koperasi	Manajemen data kenelayanan	Riset teknologi perikanan tangkap
<b>KEMHUB</b> Pengukuran GT, dokumen kapal	Partisipasi pada forum kelembagaan WPP	Pengawasan SDKP
<b>KEMENDES</b> Sinergi dana desa, desa nelayan	Sinergi pembiayaan kegiatan prioritas nasional di daerah	Sarana Pemasaran
<b>KEMENKOMAR</b> Koordinasi / sinkronisasi, peluang investasi	Menggalang dukungan pembangunan dari pihak swasta maupun pihak lainnya	<b>BUMN</b>
	Integrasi sistem perizinan	<b>Swasta</b>
	Pengembangan pelabuhan	

b. Kebijakan Pengarusutamaan

1) Pembangunan berkelanjutan

Strategi pelaksanaan meliputi:

- a) penerapan konsep ekonomi hijau;
- b) penerapan konsep eco fishing port;
- c) alternatif penggunaan bahan bakar gas untuk kapal perikanan; dan
- d) inovasi teknologi API ramah lingkungan.

2) Gender

Strategi pelaksanaan dilakukan melalui penguatan peran wanita nelayan dalam usaha perikanan tangkap.

3) Modal sosial budaya

Strategi pelaksanaan dilakukan melalui pengaplikasian kearifan lokal dalam kegiatan penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan.

4) Transformasi digital

Strategi pelaksanaan dilakukan melalui penggunaan teknologi dalam sistem pemerintahan (e-logbook, e-services perizinan, e-layar, dll).

Untuk mengakselerasi pencapaian arah kebijakan tersebut, DJPT telah menginisiasi beberapa kegiatan prioritas yang diharapkan dapat menjadi kunci, memberikan multiplier effect pada kegiatan lainnya, serta menghasilkan dampak langsung pada stakeholder. Kegiatan prioritas tersebut meliputi implementasi Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT), pemanfaatan investasi tuna, cakalang, tongkol, penyederhanaan regulasi perikanan tangkap, pengembangan pelabuhan perikanan unggul, pengembangan Kampung Nelayan Maju (KALAJU), serta armada perikanan yang kompetitif. Kegiatan prioritas setidaknya bersifat, namun tidak terbatas, sebagai akselerator setiap arah kebijakan serta terdapat unsur inovasi didalamnya. Kegiatan lainnya yang mengacu pada beberapa pertimbangan seperti dukungan legislatif dan berbagai kebijakan pimpinan lainnya masih dapat dikategorikan sebagai kegiatan prioritas dalam konteks pembangunan perikanan tangkap secara utuh.

Kegiatan Prioritas DJPT	Gambaran Umum
Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT)	Merupakan platform pengajuan izin usaha perikanan tangkap yang memungkinkan penerbitan izin dilakukan hanya dalam waktu 1 jam, dan keseluruhan prosesnya dilakukan secara online. Intensifikasi penggunaan serta berbagai pemutakhiran sistem perizinan masih terus akan dilakukan. Upaya reformasi perizinan ini
Kegiatan Prioritas DJPT	Gambaran Umum
	merupakan salah satu gebrakan untuk meningkatkan pelayanan publik serta dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki iklim investasi perikanan tangkap

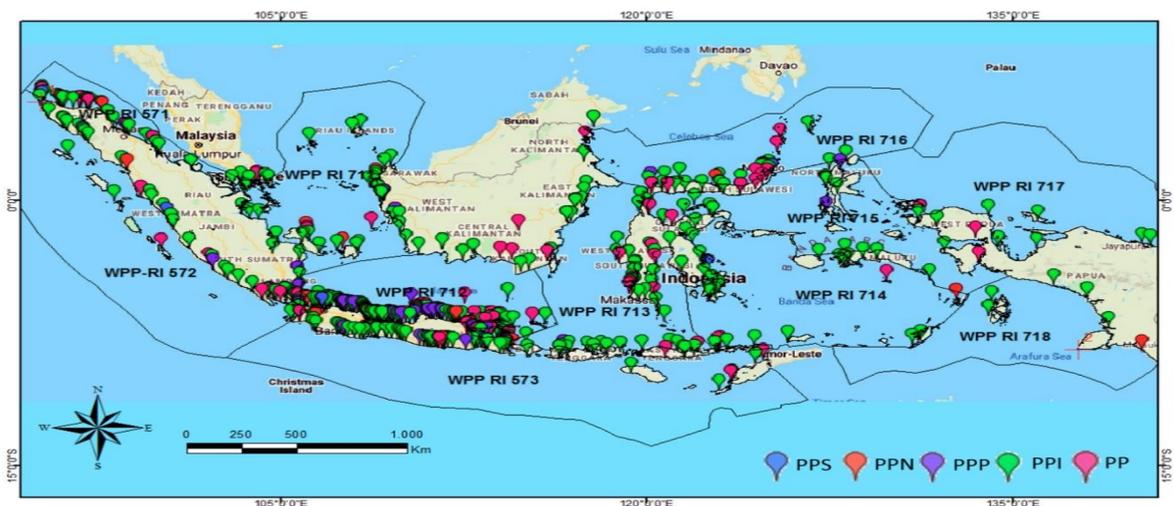
Pemanfaatan investasi tuna, cakalang, tongkol (TCT)	Peluang pemanfaatan investasi tuna diprediksi dapat mencapai 7 (tujuh) triliun rupiah. Seiring upaya diplomasi yang terus diintensifikasi dengan pengelola perikanan regional-RFMO, upaya peningkatan investasi-industrialisasi serta peningkatan kapasitas nelayan lokal pada komoditas TCT terus diakselerasi
Penyederhanaan regulasi	Dalam rangka mewujudkan usaha penangkapan ikan yang berkeadilan serta iklim investasi yang baik, sejumlah peraturan disederhanakan dan beralih pada hukum positif. Beberapa substansi penyederhanaan utama meliputi kemudahan perizinan, pengaturan penggunaan alat penangkapan ikan yang sebelumnya dilarang, kemudahan transshipment, batasan ukuran kapal yang lebih berdaya saing di ZEEI-laut lepas serta lebih melindungi nelayan kecil di perairan Kepulauan
Pelabuhan Perikanan Unggul	Peningkatan peran pelabuhan perikanan sebagai 1) pusat bisnis kelautan dan perikanan terintegrasi; 2) pusat layanan dan pendataan serta ketetelusuran yang maju, andal, dan akuntabel; serta 3) Eco Fishing Port, yakni dalam menjaga mutu ikan dan standarisasi ramah lingkungan
Kampung Nelayan Maju	Konsep perwujudan lingkungan permukiman nelayan yang maju, bersih, sehat dan nyaman yang mampu meningkatkan kualitas dan produktivitas kehidupan nelayan dan keluarganya. Salah satu strategi pengembangannya adalah melalui integrasi permukiman nelayan dengan pusat-pusat aktivitas ekonomi, seperti pelabuhan perikanan dan

Kegiatan Prioritas DJPT	Gambaran Umum
	kawasan wisata bahari-kuliner
Armada Perikanan yang Kompetitif	Untuk mewujudkan industrialisasi perikanan, diperlukan armada perikanan (kapal perikanan, alat penangkapan ikan, awak kapal perikanan), serta manajemennya yang kompetitif. Konsep yang diusung yakni pemenuhan aspek ketertelusuran (traceability), standar keamanan kapal, penanganan ikan (fish handling), serta standar keselamatan kerja

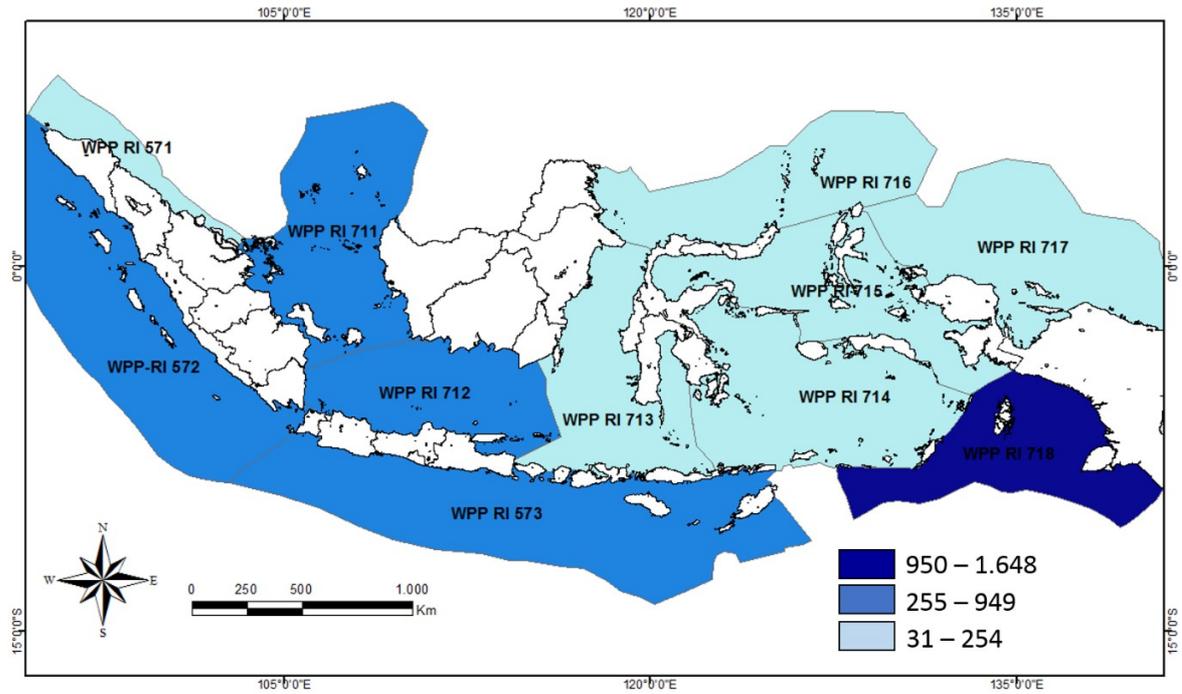
### 3. Indikasi Pembangunan Kewilayahan

Sebagaimana amanat RPJMN 2020-2024 bahwa pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan nasional harus berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Dengan demikian pada bagian ini akan disajikan indikasi pembangunan perikanan tangkap tahun 2020-2024 berbasis kewilayahan, berdasarkan: 1) Data Eksisting, yaitu sebaran 538 Pelabuhan Perikanan per WPPNRI serta sebaran kapal perikanan perizinan pusat per WPPNRI; maupun 2) Data Proyeksi, terdiri dari pertumbuhan volume produksi per provinsi, pertumbuhan nilai produksi per provinsi, pertumbuhan jumlah nelayan per provinsi, pertumbuhan NTN per provinsi, pertumbuhan volume produksi per WPPNRI, tingkat produksi komoditas Tuna-Cakalang-Tongkol (TCT) per WPPNRI, serta tingkat produksi komoditas utama per WPPNRI.

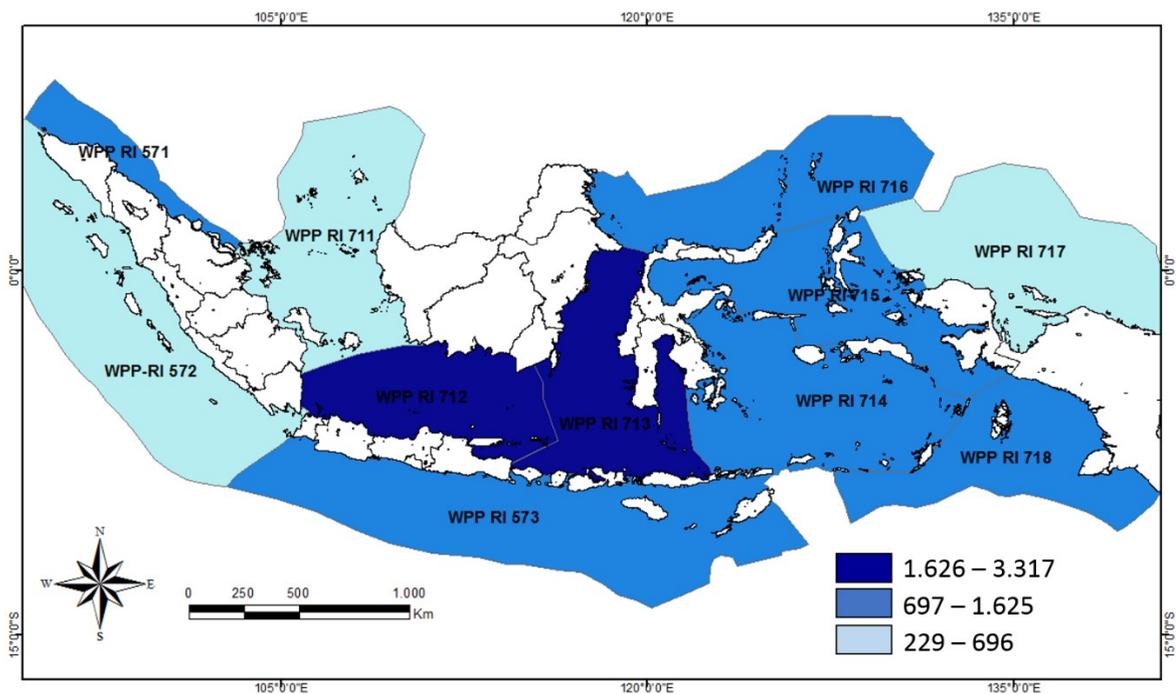
Gambar 3.4 Sebaran 538 Pelabuhan Perikanan per WPPNRI



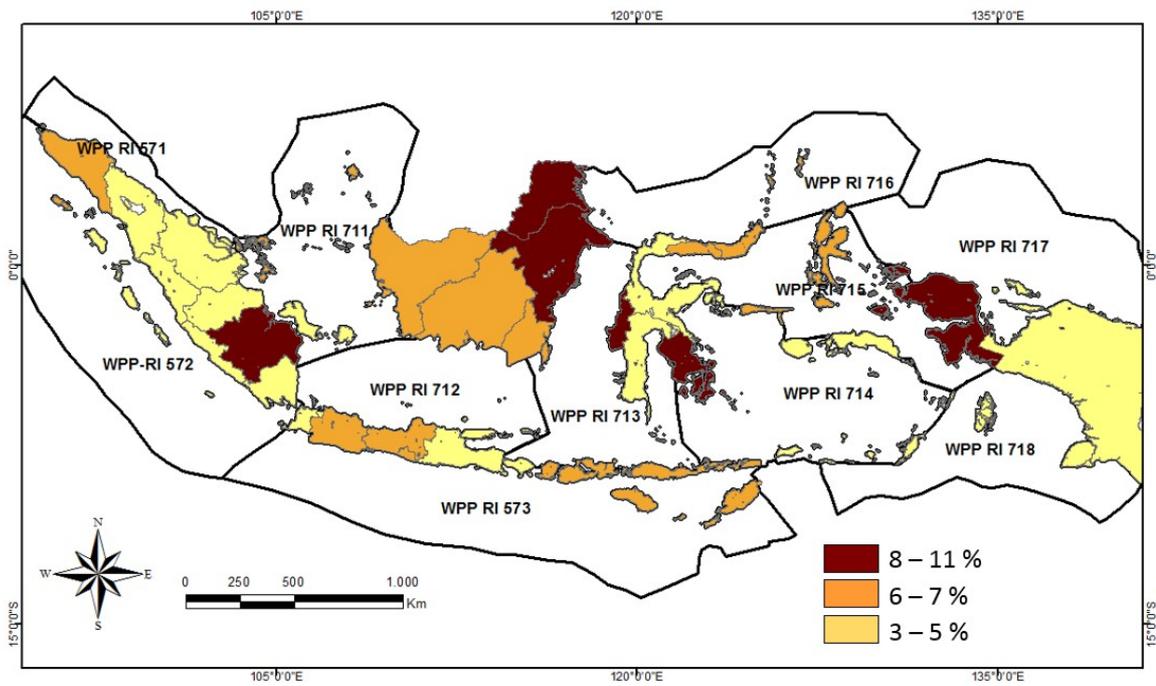
Gambar 3.5 Sebaran Kapal Perikanan Perizinan Pusat per WPPNRI (per Juli 2020)



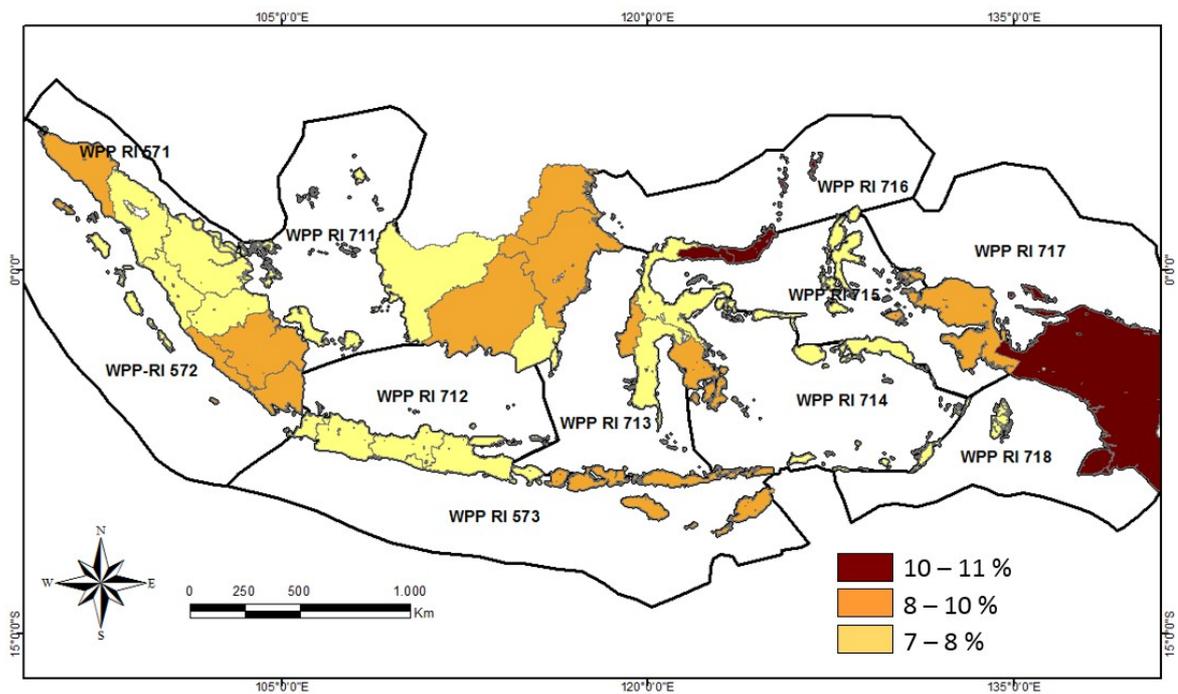
Gambar 3.6 Sebaran Kapal Perikanan Perizinan Daerah, berdasarkan SIPI pada aplikasi SIMKADA per WPPNRI (per Juli 2020)



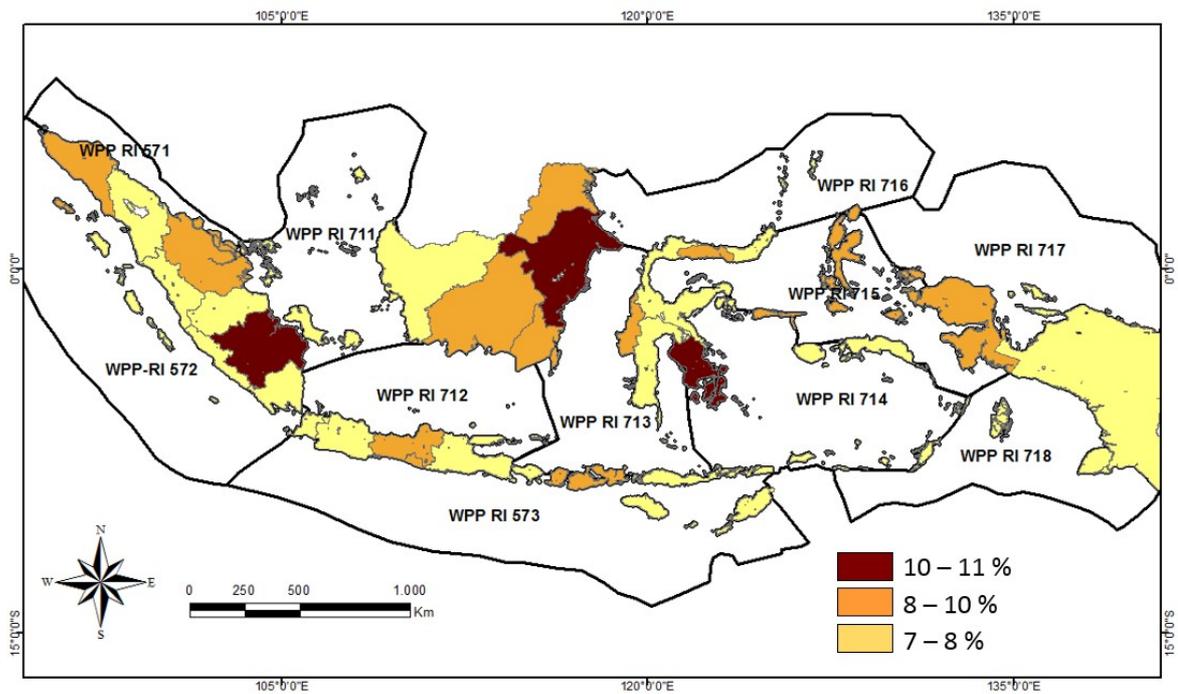
Gambar 3.7 Proyeksi Pertumbuhan Volume Produksi per Provinsi 2020-2024



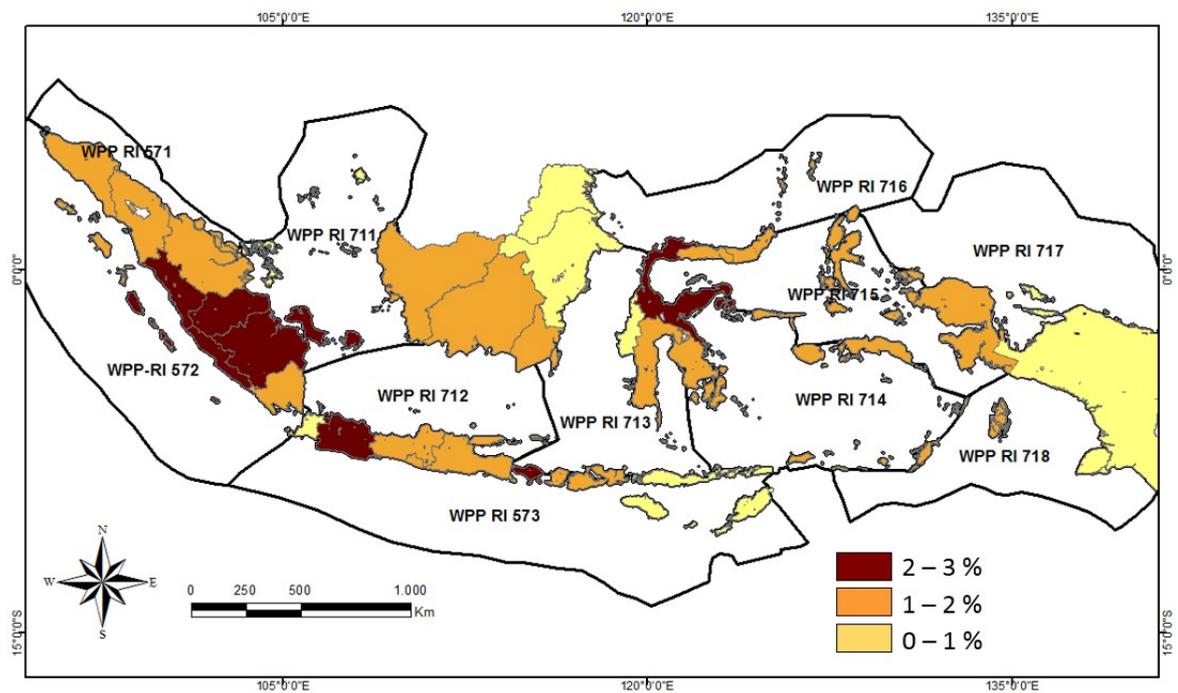
Gambar 3.8 Proyeksi Pertumbuhan Nilai Produksi per Provinsi 2020-2024



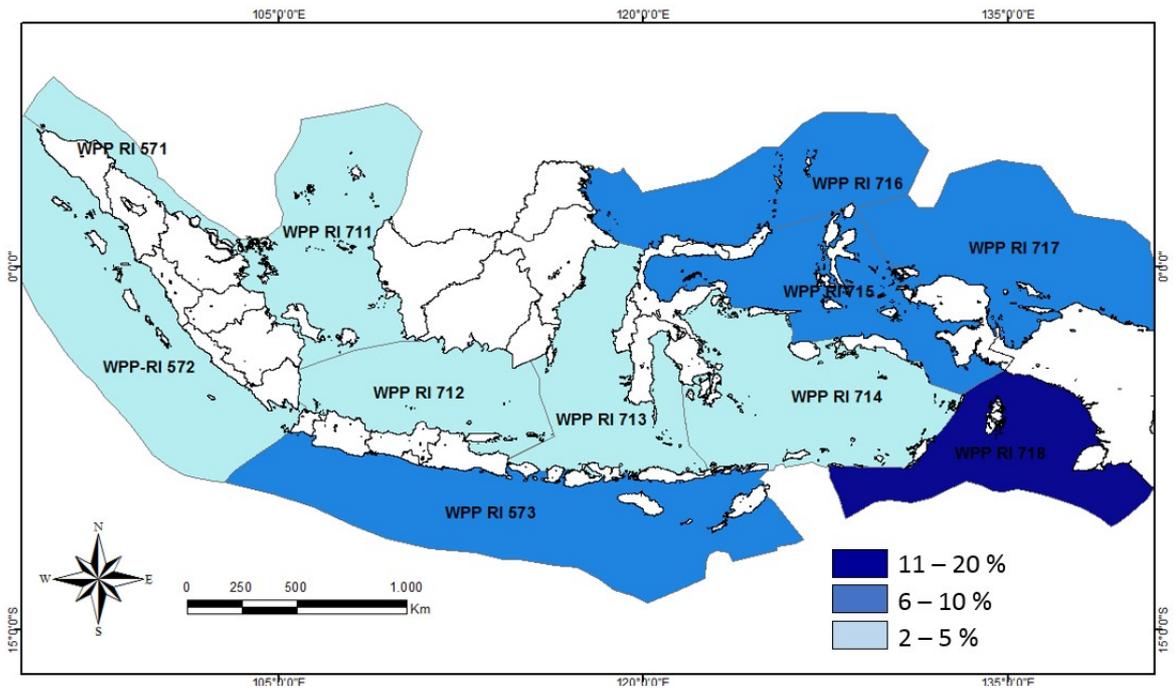
Gambar 3.9 Proyeksi Pertumbuhan Jumlah Nelayan per Provinsi 2020-2024



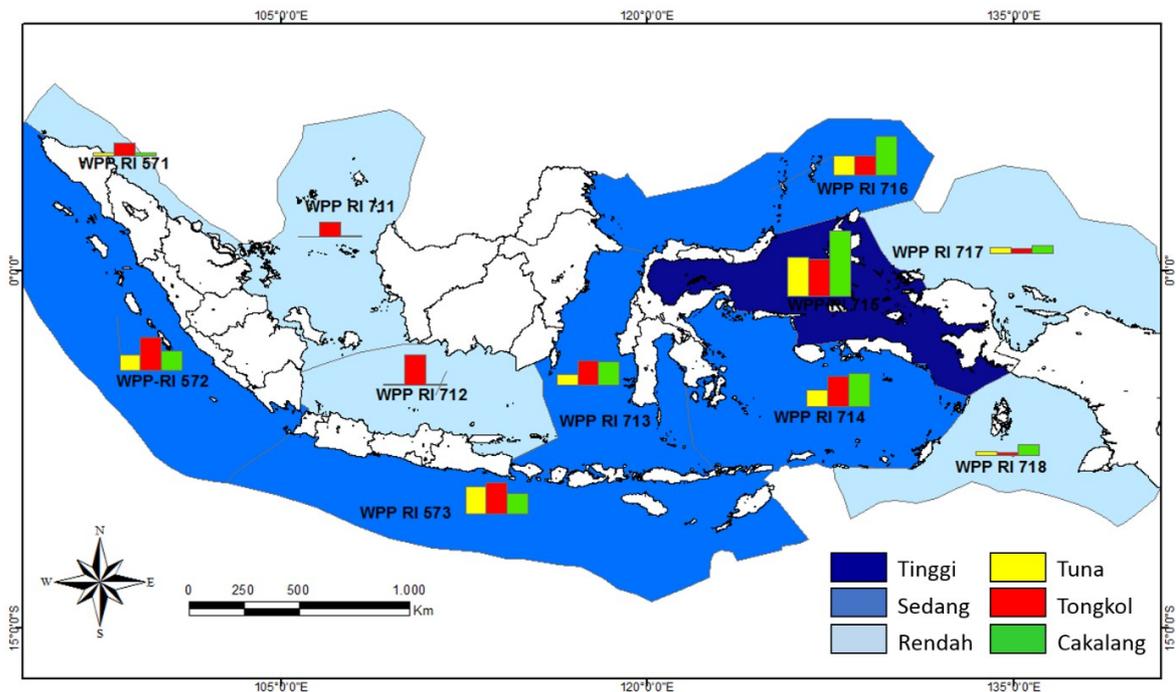
Gambar 3.10 Proyeksi Pertumbuhan NTN per Provinsi 2020-2024



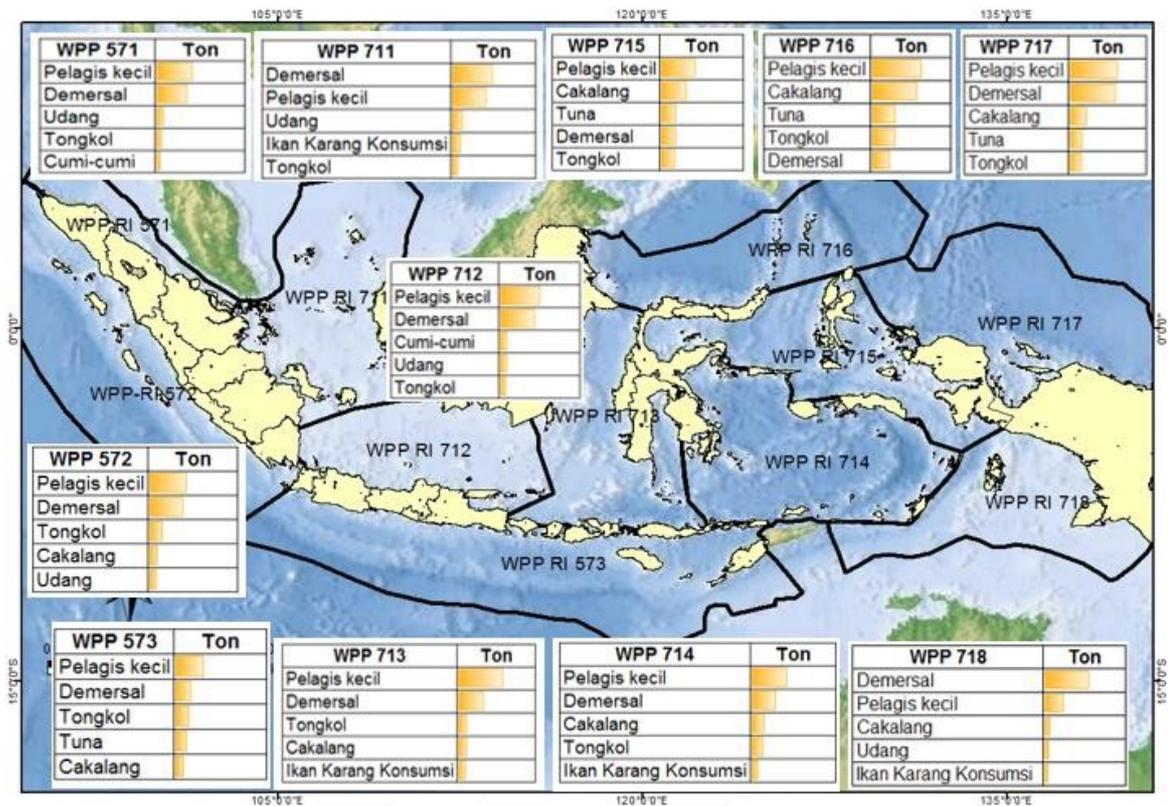
Gambar 3.11 Proyeksi Pertumbuhan Volume Produksi per WPPNRI 2020-2024



Gambar 3.12 Proyeksi Tingkat Produksi Komoditas Tuna, Cakalang, Tongkol per WPPNRI 2020-2024



Gambar 3.13 Proyeksi Tingkat Produksi Komoditas Utama per WPPNRI 2020-2024



#### 4. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi menjadi salah satu instrumen yang memiliki peranan penting dalam rangka menciptakan iklim usaha perikanan tangkap yang baik, utamanya melalui pemberian kepastian dan perlindungan hukum terhadap seluruh aspek usaha serta stakeholder perikanan tangkap.

Sejalan dengan upaya percepatan penataan regulasi sebagaimana arahan Presiden, serta menindaklanjuti masukan, aspirasi dan saran dari pemangku kepentingan kelautan dan perikanan, KKP telah menerbitkan Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan (Inmen-KP) nomor B.717/MEN-KP/XI/2019 tentang Kajian Terhadap Peraturan Bidang Kelautan dan Perikanan. Adapun pada lingkup DJPT, terdapat 17 peraturan yang menjadi bagian dari Inmen-KP tersebut, untuk rencananya disederhanakan menjadi 9 peraturan sebagaimana hasil dari serangkaian proses pembahasan yang melibatkan berbagai stakeholder perikanan tangkap. Secara rinci, rencana kerangka regulasi di lingkup DJPT selama periode 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Matrik Kerangka Regulasi.

#### 5. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat kementerian/lembaga (struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara) yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN Nasional.

Penguatan kapasitas kelembagaan DJPT secara mendasar harus dilakukan dengan memperhatikan konsep perubahan di tingkat Kementerian Kelautan dan Perikanan, yakni sebagai berikut:

- a. perubahan paradigma pengelolaan sumber daya perikanan dari production oriented ke people oriented;
- b. mandat yang diberikan, meliputi mandat konstitusional, mandat teknis, mandat pembangunan, dan mandat organisasi;
- c. kebijakan pembangunan, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, peraturan perundangan terkait yang berlaku;
- d. prinsip-prinsip pengorganisasian yang right sizing, unified

function, efektif, efisien dan transparan, sesuai dengan bisnis proses pembangunan kelautan dan perikanan; dan

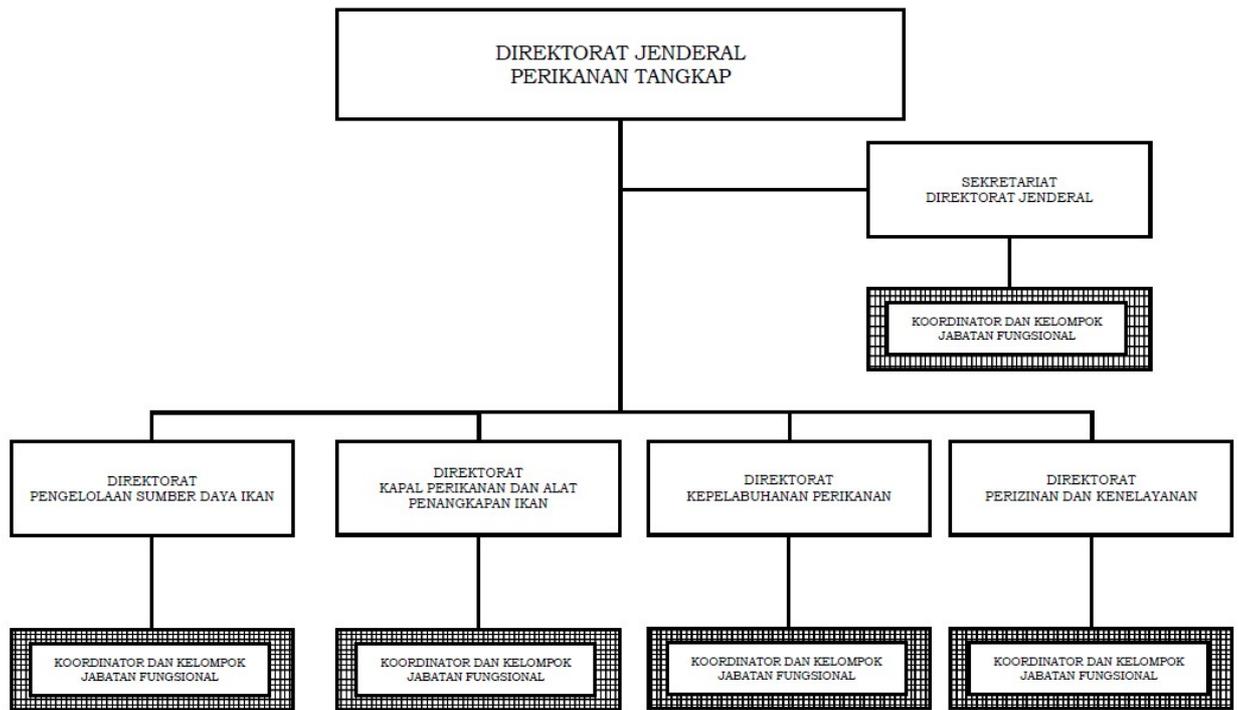
e. Tata laksana dan sumber daya aparatur.

Mengacu pada evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Ditjen Perikanan Tangkap pada periode sebelumnya, terdapat beberapa usulan penyempurnaan fungsi serta struktur organisasi DJPT sebagai berikut:

- a. Optimalisasi fungsi pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan berdasarkan substansi pengelolaan/bisnis proses pelabuhan perikanan, meliputi: Identifikasi dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan, Pembangunan Pelabuhan Perikanan, Tata Operasional Pelabuhan Perikanan, Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan, serta Sistem Informasi dan Penguatan Keterpaduan Pelabuhan Perikanan; dan
- b. Optimalisasi fungsi subbagian tata usaha sebagai unit kerja kesekretariatan di lingkup direktorat yang menangani koordinasi dan pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja, keuangan, dan barang milik negara, sumber daya manusia aparatur, organisasi dan tata laksana, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan, serta evaluasi dan pelaporan lingkup direktorat.

Struktur organisasi Ditjen Perikanan Tangkap masih mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagaimana ditampilkan dibawah ini.

Gambar 3.14 Struktur organisasi DJPT



## BAB 4. INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

### 4.1 Target Kinerja

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran (Output). Indikator Kinerja Kegiatan dalam Struktur Manajemen Kinerja di PPN Pengembangan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1 Indikator Kinerja PPN Pengembangan

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja		Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai PNBPN Sektor Perikanan Tangkap Meningkatkan di PPN Pengembangan	1	Penerimaan PNBPN Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Rp Juta)	289	215	350	400	450
2	Produktivitas perikanan tangkap di PPN Pengembangan meningkat	2	Volume produksi perikanan tangkap di PPN Pengembangan (Ton)	-	-	13.200	13.800	14.400 0
3	Pengelolaan PPN Pengembangan yang berdaya saing	3	Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Pengembangan (Persen)	-	-	-	100	100
		4	Tingkat Kinerja PPN Pengembangan (Nilai)	80	81	82	83	84
		5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)	-	-	-	80	84
4	Pengembangan dan peningkatan fasilitas PPN Pengembangan yang optimal	6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)	-	-	-	70	80
		7	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)	-	-	-	30,1	30,1
5	Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan	8	Kapal Perikanan izin daerah yang	-	-	-	50	50

	yang berdaya saing di PPN Pengambangan		memenuhi ketentuan (Kapal)					
6	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi/Terlindungi di PPN Pengambangan	9	Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan (Persen)	-	-	-	25	25
7	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan PPN Pengambangan	10	Nilai Pembangunan Zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan (Nilai)	45,10	45,10	45,10	45,10	45,10
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan (Persen)	-	-	-	80	80
		12	Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan (Nilai)	-	-	-	93	94
		13	Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan (Indeks)	72	73	79	79	79
		15	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa PPN Pengambangan (Persen)	-	72,5	75	77,5	80
		16	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN PPN Pengambangan (Persen)	-	72,5	75	77,5	80
		17	Nilai IKPA PPN Pengambangan (Nilai)	88	89	89	89	89
		18	Nilai Kinerja Anggaran PPN Pengambangan (Nilai)	-	86	86	87	87
		19	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan (Indeks)	-	-	-	88,21	88,30

## 4.2 Kerangka Pendanaan

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan perikanan tangkap, serta mencapai target sasaran utama yang

telah ditetapkan, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan pembangunan akan bersumber dari pemerintah (APBN dan PNNP), swasta, perbankan dan non perbankan, dan masyarakat serta dunia usaha. Pendanaan APBN PNNP Pengembangan difokuskan untuk pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap, penguatan regulasi, penataan perizinan, pemberdayaan dan berbagai kegiatan pembangunan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat yang terkait dengan usaha perikanan tangkap. kerangka pendanaan yang bersumber dari APBN menurut program dan kegiatan sebagaimana tercantum pada matrik kerangka pendanaan.

Tabel 4.2 Rencana Pendanaan Kegiatan dan Anggaran di PPN Pengembangan Tahun 2020 – 2024

No	Program/Kegiatan(output)	Alokasi Anggaran (Juta Rupiah)					LOKASI	APBN
		2020	2021	2022	2023	2024		
<b>1</b>	<b>Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan</b>	80.900.000	16.500.000	125.000.000	20.436.000	24.523.200	Jembrana	APBN
A	Awak kapal perikanan yang tersertifikasi	7.000.000						
B	Permsinan kapal perikanan yang memenuhi aspek operasional penangkapan ikan	28.900.000						
C	Perjanjian kerja laut (PKL) yang diterapkan	45.000.000						
<b>2</b>	<b>Pengelolaan Pelabuhan Perikanan</b>	6.366.704.000	9.836.200.000	5.163.138.000	14.776.950.000	17.732.340.000	Jembrana	APBN
A	Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) yang ditingkatkan fasilitasnya	5.580.383.000						
B	Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) yang meningkat operasionalnya	641.200.000						
C	Layanan sarana dan prasarana internal	145.121.000						
<b>3</b>	<b>Pengelolaan Perizinan dan Kenelayan</b>	59.318.000	59.318.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	Jembrana	APBN
A	Sistem perizinan pusat-daerah yang terintegrasi	51.318.000						

B	Nelayan yang terfasilitasi kredit perikanan tangkap	8.000.000						
<b>4</b>	<b>Pengelolaan Sumber Daya Ikan</b>	188.912.000	34.040.000	58.320.000	41.916.000	50.299.200	Jembrana	APBN
A	Laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan yang dikelola sumber daya ikannya	12.484.000						
B	Kapal perikanan yang menerapkan Logbook penangkapan ikan	176.428.000						
<b>5</b>	<b>Dukungan Manajemen</b>	8.134.225.000	8.903.529.000	9.059.177.000	13.988.727.600	16.786.473.120	jembrana	APBN
A	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	295.000.000						
B	Layanan Perkantoran	7.839.225.000						
	TOTAL	14.830.059.000	18.849.587.000	14.414.635.000	28.836.029.600	34.601.635.520		

## **BAB 5. PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan, Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2020–2024 merupakan acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan, Ditjen Perikanan Tangkap, sehingga penyusunan lebih terarah dan terencana dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan serta lebih efisien dalam pelaksanaannya, baik dipandang dari aspek pengelolaan sumber pembiayaan maupun dalam percepatan waktu realisasinya.

Renstra Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan, Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2020-2024 disusun dengan mempertimbangkan potensi, peluang, serta kendala, dan permasalahan yang dihadapi sehingga penetapan target-target yang berorientasi pada hasil dan diharapkan dapat dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Kegiatan-kegiatan dengan output yang mendukung prioritas nasional menjadi prioritas utama, selain kegiatan-kegiatan yang secara langsung menjadi tanggung jawab dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan, Ditjen Perikanan Tangkap. Namun demikian, Renstra ini dimungkinkan untuk dilakukan penyesuaian-penyesuaian sejalan dengan dinamika perkembangan internal dan eksternal organisasi.

Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan kegiatan dan anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan, Ditjen Perikanan Tangkap juga dihasilkan berkat adanya dukungan seluruh jajaran pegawai pelabuhan, instansi terkait dan stakeholder dikawasan pelabuhan perikanan. Kerja keras dari seluruh pimpinan dan staf Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan, Ditjen Perikanan Tangkap dan sinergitas dengan semua pihak yang terkait sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan tujuan serta sasaran kegiatan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan, Ditjen Perikanan Tangkap yang tertuang dalam Rencana Strategis ini.

## NOTULENSI RAPAT RENSTRA 2020 – 2024

Tempat : Ruang rapat PPN Pengembangan  
 Waktu : 28 November 2023  
 Peserta : 1. Kepala Pelabuhan  
 2. Subkordinator PPN Pengembangan  
 3. Tim Pengelola Kinerja

Pembukaan : rapat review renstra dilakukan oleh bapak Andi Mannoengi selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan

Hasil Rapat : setelah dilakukan review renstra PPN Pengembangan tahun 2020 – 2024 maka terdapat perubahan perubahan yaitu sasaran strategis pada renstra sehingga perlu adanya perubahan rentra sehingga dapat selaras dengan Renstra DJPT.

No	Uraian	Renstra DJPT	Renstra PPN Pengembangan	Keterangan
1.	Visi	Terwujudnya Perikanan Tangkap yang Maju dan Berkelanjutan serta Masyarakat Perikanan Tangkap yang Sejahtera” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”.	Terwujudnya Perikanan Tangkap yang Maju dan Berkelanjutan serta Masyarakat Perikanan Tangkap yang Sejahtera” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”.	Sudah sesuai
2.	Misi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, melalui peningkatan SDM Masyarakat Perikanan Tangkap;</li> <li>2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, melalui peningkatan kontribusi ekonomi sub sector perikanan tangkap; Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui peningkatan keberlanjutan</li> <li>3. sumberdaya perikanan tangkap; dan Pengelolaan Pemerintahan yang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, peningkatan SDM Masyarakat Perikanan Tangkap;</li> <li>2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, melalui peningkatan kontribusi ekonomi sub sector perikanan tangkap; Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui peningkatan keberlanjutan sumberdaya perikanan tangkap; dan Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan</li> </ol>	Sudah sesuai

		Terpercaya melalui peningkatan tata kelola Pemerintahan di lingkup PPN Pengambengan.	Terpercaya melalui peningkatan tata kelola Pemerintahan di lingkup PPN Pengambengan.	
3.	Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat Perikanan Tangkap, yaitu meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM Perikanan tangkap termasuk memberdayakan nelayan;</li> <li>2. Peningkatan kontribusi ekonomi subsector perikanan tangkap</li> <li>3. Peningkatan keberlanjutan sumberdaya perikanan tangkap, yaitu optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya ikanberbasis WPP-NRI;</li> <li>4. Peningkatan tata kelola pemerintahan di lingkup DJPT, yaitu meningkatnya kinerja reformasi birokrasi DJPT secar berkualitas.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat Perikanan Tangkap, yaitu meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM Perikanan tangkap termasuk memberdayakan nelayan;</li> <li>2. Peningkatan kontribusi ekonomi subsector perikanan tangkap</li> <li>3. Peningkatan keberlanjutan sumberdaya perikanan tangkap, yaitu optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya ikanberbasis WPP-NRI;</li> <li>4. Peningkatan tata kelola pemerintahan di lingkup DJPT, yaitu meningkatnya kinerja reformasi birokrasi DJPT secar berkualitas.</li> </ol>	Sudah sesuai
4.	Sasaran Strategis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. kesejahteraan nelayan meningkat</li> <li>2. sumber daya perikanan tangkap berkelanjutan</li> <li>3. tata kelola sumber daya perikanan tangkap bertanggung jawab,</li> <li>4. produktivitas perikanan tangkap meningkat</li> <li>5. Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan DJPT</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di PPN Pengambengan mendukung SS 1</li> <li>2. Produktivitas perikanan tangkap di PPN Pengambengan meningkat mendukung SS 4</li> <li>3. Pengelolaan PPN Pengambengan yang berdaya saing mendukung SS 3</li> <li>4. Pengembangan dan peningkatan fasilitas PPN Pengambengan yang optimal mendukung SS 3</li> <li>5. Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di PPN Pengambengan mendukung SS 3</li> <li>6. Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang</li> </ol>	Sasaran strategis sudah sesuai antara DJPT dengan KKP kemudian PPN Pengambengan dengan DJPT saling mendukung

			<p>Di PPN Pengambengan mendukung SS 3</p> <p>7. Tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan PPN Pengambengan mendukung SS 5</p>	
5.	Arah Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperbaiki komunikasi dengan nelayan dan stakeholder untuk perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan berbasis data, informasi, dan pengetahuan yang faktual.</li> <li>2. Pengelolaan sumber daya perikanan tangkap yang berkelanjutan.</li> <li>3. Reformasi Birokrasi DJPT menuju birokrasi yang lebih berkualitas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperbaiki komunikasi dengan nelayan dan stakeholder untuk perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan berbasis data, informasi, dan pengetahuan yang faktual.</li> <li>2. daya perikanan tangkap yang berkelanjutan.</li> <li>3. Reformasi Birokrasi DJPT menuju birokrasi yang lebih berkualitas</li> </ol>	Arah kebijakan diselaraskan sesuai dengan DJPT dengan menerjemahkan arah kebijakan sesuai dengan tugas dan fungsi pelabuhan perikanan
6.	Perjanjian Kinerja	Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja DJPT telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran (Output).	Indikator kinerja pelabuhan disusun berdasarkan Perjanjian kinerja yang telah diepakati dengan DJPT yang selaras dengan renstra tahun 2020 – 2024. PK tahun 2023 sejumlah 18.	Penyesuaian PK yang dibuat pada tahun 2023 dengan renstra yang sudah ada yaitu sejumlah 18 PK

## DOKUMENTASI



DAFTAR HADIR

Tempat : Ruang Rapat PPN Pengembangan

No	Nama	Jabatan/instansi	Tanda Tangan
1	Andi Manjengti	Kepala Pelabuhan	<del>_____</del>
2	Lukman Hadi	Kasubag Umum	<del>_____</del>
3	Ambar Triharnanto	Sub. Koordinator Syahbandar	_____
4	Yenni Nurul	Sub. Koordinator TEPU	_____
5	Bagus Sudamanjaya	Sub. Koordinator OP	_____
6	Angga Prasetya	P3T	_____
7	Nurul Lady C	Analisis Kepasawaran	_____
8	Muhiburrahman	AP3T	_____
9	Melatiang Ramadhona	Aparnis Pelaksana	_____
10	Aisyah Nurulita	P3T	_____